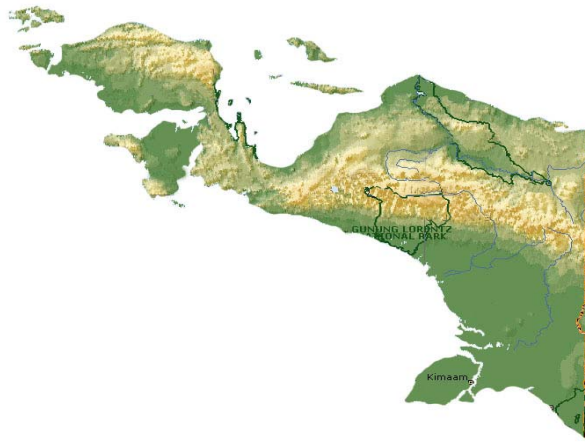


“Borok-borok ditelanjangi”

(April – Juni 2006)



Sekilas Informasi

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

www.hampapua.org

Jayapura

Desember 2006

Bagian I

Lintasan Peristiwa Hak Asasi Manusia April– Juni 2006

I. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

A. Hebohnya pencari suaka

1 April

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesalkan pemuatan kartun di *The Weekend Australian* yang menggambarkan seorang berkopiah hitam dan berekor, yang dikonotasikan seperti dirinya tengah “menunggangi” seorang lelaki berkulit hitam seperti seorang warga Papua sambil berkata, “Don,t take this the wrong way”. Kekesalannya ini diungkapkan melalui juru bicaranya Dino Patti Djalal. Dikatakannya bahwa pemuatan kartun itu berpotensi memanaskan situasi hubungan kedua negara yang sebenarnya sudah mulai mereda pasca pemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua.

2 April

Menyusul semakin memburuknya hubungan Indonesia – Australia enam anggota Komisi I DPR RI akan diberangkatkan ke Australia, tegas Jeffry Johanes Massie, anggota DPR dari fraksi Partai Damai Sejahtera. Kepergian mereka dalam rangka mencoba mengurangi ketegangan yang semakin meningkat setelah munculnya karikatur tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam tulisan “Suaka Papua dan Australia” Rakaryan Sukarjaputra (penulis lepas) menulis, “Kita di Indonesia memang patut marah karena pemberian visa (42 warga Papua) itu memang bermakna banyak. Misalnya seperti yang disampaikan Departemen Luar Negeri RI, pemberian visa itu secara langsung maupun tidak langsung bisa dimaknai sebagai tanda pembenaran pemerintah Australia atas apa-apa yang disampaikan secara sepihak oleh para pengungsi warga Papua itu yang beberapa diantaranya masih anak-anak”. Dampak langsung pembenaran itu adalah tentu saja gambaran bahwa pemerintah Indonesia melakukan genosida dan berbagai tindak kekerasan yang tidak berprikemanusiaan di Papua semakin tergambar di kalangan publik internasional. Selain itu, dampak ekonomi dari pemberian visa ini adalah semakin ragunya para investor untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di Papua. Hal ini tidak secara langsung menyengsarakan rakyat Papua.

3 April

42 warga Indonesia asal Papua yang mencari suaka politik tiba di Melbourne dari Christmas Island. Mereka diberi visa sementara oleh Departemen Imigrasi Australia (DIMIA). Ketika tiba, mereka meneriakkan kata merdeka dalam Bahasa Inggris dan juga membentangkan bendera Bintang Kejora.

Melihat hubungan Indonesia – Australia yang semakin tegang, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono menegaskan, perlu melakukan dialog kembali untuk menata ulang

kerangka kerja sama dan persahabatan yang bersifat strategis dan komprehensif. Presiden yakin bahwa masalah yang sekarang sedang dihadapi akan mendapatkan solusinya, yang terpenting kedua negara memiliki niat baik, kejujuran dan kesungguhan untuk menjalin persahabatan, kerjasama dan kemitraan. Sedangkan berkaitan dengan karikatur yang menggambarkan dirinya tengah “menunggangi” orang Papua di Weekend Australian, Presiden Yudhoyono menyampaikan kekesalan dan keprihatinannya. Namun dia menganjurkan agar semua pihak menahan diri. Sementara pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua, Yudhoyono mengatakan, “Bagi bangsa Indonesia pemberian visa ini bukan sekedar pemberian suaka kepada pencari suaka. Akan tetapi itu berkenaan dengan sesuatu yang sangat fundamental, yaitu kedaulatan dan kehormatan sebagai bangsa dan negara.”

4 April

Rencana kepergian 6 anggota DPR RI ke Australia menuai banyak protes, baik dari anggota komisi I sendiri maupun dari luar komisi. Bagi mereka yang protes, rencana kepergian ini belum memiliki agenda yang jelas, menyalahi prosedur dan malah bisa melemahkan diplomasi Indonesia–Australia. Enam anggota DPR RI yang akan berangkat ke Australia adalah: Efendi MS. Simbolon (F-PDIP), Deddy Djamaluddin Malik (F-PAN), Yuddy Chrisnandy (F-PG), Happy Bone Zulkarnaen (F-PG), Ali Mochtar Ngabalin (F-BPD), dan Jeffrey J. Massie (F-PDS).

5 April

Enam anggota DPR RI menduga kuat pemerintah dan masyarakat Australia mendukung gerakan separatisme di Papua. Dugaan ini diperkuat dengan daftar nama-nama senator, anggota-anggota parlemen, tokoh partai, peneliti, maupun aktivis di Australia yang terlibat. Ada 16 nama yang diduga kuat terlibat dalam gerakan separatis ini.

6 April

Dalam tulisan “Mencari Suaka itu Konstitusional”, oleh Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Imparsial, bahwa “Hak mencari suaka politik adalah hak individual. Sepenuhnya terserah kepada si individu untuk memutuskan kapan dan mengapa hak itu digunakan. Pikiran dan tubuh manusia bukanlah yurisdiksi negara. Pemerintah tidak boleh merasa memiliki pikiran dan tubuh warganya meski atas nama kedaulatan negara”. Hak suaka ini dilindungi amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 G ayat 2 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hak suaka politik ini dilindungi oleh hukum nasional.

7 April

Menanggapi semakin hangatnya persoalan suaka warga Papua, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, “Tak ada bahaya separatisme dari persoalan Papua....Saya yakin kalau rakyat diperlakukan baik, adil, dihargai martabat kesukuan, agama dan adatnya, mereka tidak akan ke luar negeri. Persoalan Papua harus diselesaikan secara damai”. Sementara Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Australia bertemu dengan pejabat kementerian Luar Negeri Australia urusan Asia, Paul Grigson untuk meminta pembatalan visa ke- 42 warga Papua.

8 April

Menanggapi polemik 42 warga Papua yang bersuaka ke Australia, Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Abner Kaisepo menegaskan, sebaiknya polemik seputar pemberian visa sementara bagi 42 warga Papua di Australia dihentikan. Karena

menurutnya, justru polemik ini memicu eksodus. Contohnya, ketika ada kasus 42 orang mendapat visa izin tinggal sementara dari Australia dan dikecam Indonesia, justru 6 warga Merauke berusaha untuk ke Australia.

14 April

Pemerintah Australia memperbaharui UU Imigrasi yang intinya tidak akan memberikan status apapun kepada para pencari suaka dan menempatkan mereka di luar daratan Australia. Berkaitan dengan UU ini, Perdana Menteri John Howard mengatakan, "UU yang baru ini dibuat bukan sebagai upaya untuk meredakan kemarahan Pemerintah Indonesia. Bukan juga hasil dari meningkatnya ketegangan antara Australia dan Indonesia terkait pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga pencari suaka asal Papua. Ini bukan dilakukan sebagai konsensi kepada Indonesia. Namun, jika pemberlakuan aturan baru ini membantu membaiknya kembali hubungan dengan Indonesia itu adalah sebuah hal yang bagus".

18 April

Perdana Menteri Australia John Howard menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Indonesia mengenai keputusan pemberian suaka kepada 42 warga Papua. Ia juga menyangkal bahwa keputusan Australia untuk memperketat kebijakan pengungsi merupakan upaya untuk meredakan kemarahan Jakarta. Meski demikian, Howard akan tetap memainkan peranan pribadi untuk memperbaiki hubungan kedua negara.

21 April

Sebuah perahu Long Boat yang membawa 20 orang yang diduga akan mencari suaka ke negara PNG diterjang ombak hingga terbalik. Dari 20 orang penumpang, satu diantaranya tewas, 2 orang dirawat dan 18 orang belum diketahui nasibnya. Korban tewas bernama Salmon Keiya dan yang mengalami luka-luka adalah Jefrianus Pigome (26) dan John Wenda (40). Berkaitan dengan kasus ini, Kapolda meminta agar oknum-oknum yang mengatur pencari suaka menghentikan tindakannya itu.

30 April

Bendera Bintang Kejora berkibar di depan Konsulat RI di Sydney-Australia. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari tuntutan kemerdekaan Papua. Bersamaan dengan pengibaran bendera, para pendemo juga menyanyikan lagu yang menyerukan kemerdekaan Papua. Aksi ini dimaksudkan untuk membuka mata dunia akan kekerasan yang terjadi di Indonesia terhadap warga Papua, terang David Haluk.

1 Mei

Pengibaran bendera Bintang Kejora di Sydney pada 30 April diprotes oleh Pemerintah Indonesia. Departemen Luar Negeri menegaskan akan melayangkan surat protes kepada Pemerintah Australia, karena pengibaran bendera ini dapat membuat hubungan Indonesia-Australia kembali memanas.

9 Mei

Tiga warga Papua kembali berusaha masuk Australia secara illegal dan ditemukan oleh Aparat Imigrasi Australia. Menteri Imigrasi Australia Amanda Vanstone menjelaskan, ketiga warga Papua itu berangkat dari Papua melalui PNG dan kemudian ke Australia dengan menggunakan perahu. Kemungkinan mereka akan dikembalikan ke PNG.

12 Mei

Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid menilai pemerintah terlalu berlebihan menanggapi isu gerakan separatisme di Papua. Menurut Wahid, ketegasan sikap dari pemerintah tetap perlu, tetapi jangan sampai pemerintah salah mengambil langkah. Ide separatisme justru muncul ketika terjadi ketidakadilan. Dengan kondisi sumber daya alam yang sangat berlimpah, masyarakat Papua justru miskin. Pendapat ini disetujui oleh mantan ketua DPR RI Akbar Tandjung. Menurut Akbar, tidak konsistennya pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah justru menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya keyakinan masyarakat Papua terhadap niat baik pemerintah. Menurut Dewan Adat Papua (DAP), Tom Beanal, Pemerintah Indonesia diharapkan membangun Papua dengan sentuhan kemanusiaan ketimbang hanya memberikan uang.

1 Juni

Untuk mendalami masalah-masalah yang terjadi di Papua terutama kasus pemberian suaka kepada 42 warga Papua, Komisi I DPR RI berkunjung ke Papua. Dalam kunjungan ini, mereka bertemu dengan sejumlah tokoh, diantaranya, MRP, DPRP, Solidaritas Perempuan Papua (SPP), LSM, mahasiswa, pihak keamanan, tokoh Agama, dan mahasiswa yang sedang dalam proses hukum. Ketua tim, Yorris Raweyai mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk mengetahui secara pasti keadaan, situasi, dan perkembangan politik yang terjadi di Papua saat ini. Sementara itu, pejabat Gubernur Sodjuangon Sitomorang menjelaskan, solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua ada di UU OTSUS.

13 Juni

5 Delegasi Komisi I DPR RI, Yuddy Chrisnandi, Muhammad AS Hikam (F-KB), Yusron Ihza (F-BPD), Boy M.W. Saul (F-Demokrat), dan Chudlary Syafii Hadzami (F-PP), didampingi Dubes Hamzah Thayeb bertemu dengan Perdana Menteri Australia John Howard di Canberra. Dalam pertemuan itu, delegasi Komisi I DPR RI meminta Pemerintah Australia agar lebih sensitif terhadap perasaan bangsa Indonesia dalam isu Papua dan berharap bisa menjadi negara tetangga yang baik, saling menghormati dan jujur. Selain bertemu Perdana Menteri, delegasi ini juga bertemu dengan Menteri Imigrasi, Amanda Vantone, Wakil Parlemen Australia Urusan Luar Negeri, dan Menlu Alexander Downer.

Menanggapi keberangkatan 5 delegasi Komisi I DPR RI ini, Wawan H. Purwanto, pengamat intelijen mengatakan, keberangkatan mereka ke Canberra dan Melbourne Australia adalah untuk berdialog dengan kalangan pemerintah, Parlemen, Akademisi dan Gereja tentang isu Papua dan hubungan kedua Negara agar bisa meluruskan opini dunia tentang Indonesia.

14 Juni

Kunjungan Komisi I DPR ke Australia membuahkan hasil. Mereka menemui Perdana Menteri John Howard, Menlu Alexander Downer dan Menteri Imigrasi Amanda Vanstone serta Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Australia Pendeta Prof. James Haire. Pertemuan itu membahas pemberian visa tinggal sementara terhadap 42 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua. Palsunya apa yang dituduhkan selama ini bahwa mereka mengalami pengejaran dan adanya genosida di Papua tidak benar. Dampak politik dari hal ini sangat kecil tetapi mempengaruhi hubungan kedua negara, juga menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah Australia yang membiarkan ke-42 WNI asal Papua melakukan kegiatan politik selama di Australia. Buktinya mereka mengibarkan bendera Papua Merdeka di depan Konsulat Jendral RI di Melbourne.

B. Konflik Pilkada Gubernur Papua

3 April

Setelah melalui proses perhitungan suara yang alot, akhirnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no urut 4, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem dipastikan menang oleh KPUD Provinsi Papua. Pasangan Barnabas/Hesegem memperoleh suara terbanyak 354. 763 suara. Pasangan Enembe/Aituarauw 333. 629 suara. Pasangan Ibo/Kossy 258. 472 suara. Pasangan Karma/Mote 112. 032 suara. Pasangan Wabiser/Inaury 67. 678 suara.

5 April

Setelah KPU menetapkan pasangan Barnabas Suebu – Alex Hesegem sebagai pasangan peraih suara terbanyak, pasangan Lukas Enembe – Aituarauw mengajukan keberatan melalui kuasa hukumnya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jayapura. Dalam permohonan itu mereka meminta agar Mahkamah Agung memutuskan mereka sebagai peraih suara terbanyak hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Alasannya, rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Yahukimo telah dimanipulasi, khususnya di Distrik Kurima dan Anggruk. Akibatnya, perolehan suara pasangan Suebu – Hesegem ditambah 17. 421 suara, sementara perolehan suara Enembe – Aituarauw (pemohon) dikurangi 10. 229 suara.

6 April

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Barnabas Suebu - Alex Hesegem mengajukan permohonan keberatan atas hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Papua. Tim kuasa hukum Suebu/Hesegem menyatakan perolehan suara yang ditetapkan KPU Paniai telah dimanipulasi, dengan adanya pengelembungan suara untuk pasangan Enembe–Aituarauw di Kabupaten itu.

7 April

Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Barnabas Suebu dan Alex Hesegem mendatangi Polda Papua, melaporkan adanya dugaan *money politics* atau penyuapan di daerah pemilihan III Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Sebagai barang bukti adanya penyuapan, mereka menyerahkan uang sebesar Rp. 100 juta ke Polda Papua. Dikatakan bahwa uang itu mereka dapat dari seorang Bendahara Panitia Pemilihan Distrik Dapil III Anggruk.

3 Mei

Enam tokoh adat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adat Papua meminta kepada Presiden RI melalui Mendagri untuk tidak melantik gubernur terpilih. Selain itu, mereka juga mendesak DPR Papua agar tidak mengeluarkan usulan pengesahan hasil pleno KPU Provinsi Papua tentang pilkada calon gubernur Papua terpilih. Menanggapi permintaan ini, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman menegaskan, belum dapat mengesahkan gubernur terpilih Papua dan Irian Jaya Barat karena sengketa hasil Pilkada kedua daerah itu masih diproses oleh MA.

5 Mei

Direktris Yayasan Penegak Pancasila, Herlina Rosa Papare dalam komentarnya tentang Pilkada menegaskan, “Selama 43 tahun Papua berintegrasi ke dalam NKRI, sudah enam gubernur putra asli Papua. Namun tak satu pun bisa membawa Papua ke era yang lebih demokratis, maju dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena keenam gubernur itu lebih menonjolkan karakter suku daripada memayungi 312 suku asli dan pendatang di Papua. Kepentingan suku lebih diprioritaskan dalam pengambilan setiap keputusan.

Akibatnya, pembangunan di Papua terhambat. Tim sukses dari pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ini juga sudah menyusun tata organisasi pemerintahan baru juga dengan semangat sukuisme”.

Dalam rangka menyongsong sidang gugatan Pilkada Papua, KPUD Papua telah menyiapkan 6 pengacara. Lima diantaranya berasal dari Papua, sedangkan 1 orang berasal dari LBH Jakarta. Sidang ini direncanakan akan dilaksanakan di Gedung MA–RI.

8 Mei

Pasangan calon gubernur Lukas Enembe dan Airobi menggugat KPUD terkait dengan SK KPU Papua No. 14/2006 tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang dimenangkan oleh pasangan Barnabas Suebu dan Alex Hesegem. Selain menggugat SK KPU itu, pasangan ini juga menggugat agar MA membatalkan SK KPU no. 14/2006 dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah harus dimenangkan oleh pasangan calon gubernur Lukas Enembe dan Arobi

9 Mei

Sidang gugatan pasangan calon gubernur Barnabas Suebu dan Alex Hesegem dimulai. Melalui kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, Suebu dan Alex menyampaikan dua keberatan berkaitan dengan Pilkada. Pertama, mengenai rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada Papua 2006 dan kedua mengenai politik uang yang dilakukan oleh kandidat lain.

18 Mei

Sidang lanjutan kasus gugatan hasil Pilkada Papua dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kembali digelar. Sidang ini secara khusus diisi dengan mendengarkan kesaksian para saksi. Dalam kesaksiannya, saksi dari KPUD Yahukimo, bendahara PPD Anggruk, Kabupaten Yahukimo mengaku sempat disuap oleh Tim dari pasangan Lukas Enembe dan Aituarauw sebesar 100 juta rupiah.

23 Mei

Berkaitan dengan sidang gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2006 – 2011, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI akhirnya menolak keberatan dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Barnabas Suebu / Alex Hesegem, Lukas Enembe/ Aituarauw dan John Ibo/ Paskalis Kossy. Akibat dari keputusan ini, masa pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Lukas Enembe/Aituarauw melampiasikan kemarahan dengan mengobrak-abrik ruang sidang dan mengejar ketua KPU Papua, Ferry Kareth dan anggota KPU Johannes Bonai. Sidang ini dimenangkan oleh KPUD Papua.

Dalam rangka mengantisipasi situasi pasca keputusan MA, Kapolda Papua Tommy Yacobus mengingatkan para anggotanya untuk selalu mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi, termasuk menyiapkan satu mobil penyemprot air, yang baru didatangkan dari Mabes Polri.

25 Mei

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan MA tentang sidang gugatan Pilkada Papua yang dimenangkan KPUD Papua, ketua KPUD Ferry Kareth menegaskan, sidang pleno akan secepatnya dibuat apabila sudah ada surat keputusan dari MA.

29 Mei

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya keributan, (demo) yang mengarah ke tindakan anarkis berkaitan dengan putusan gugatan Pilkada Papua di Mahkamah Agung di Jakarta, Kapolda Papua menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas. Sebaliknya kalau demo itu adalah demo damai, maka pihak kepolisian akan mendampingi.

Puluhan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Enembe/Arobi yang menamakan diri Forum Pembela Demokrasi Papua mendatangi Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Mereka memprotes keputusan MA, yang menolak keberatan Lukas Enembe/Arobi pada 23 Mei 2006.

1 Juni

Hasil pleno KPUD Provinsi Papua tentang penetapan pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diserahkan kepada DPRD Provinsi Papua untuk seterusnya diajukan kepada Presiden melalui Mendagri. Menurut Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, SH. M.Hum, pelaksanaan pleno KPUD tersebut sejalan dengan UU dan PP No. 6/2004 yakni, proses penetapan hasil Pilkada Papua harus segera dilaksanakan setelah amar putusan Mahkamah Agung menolak keberatan tiga pasangan calon atas pleno KPUD Provinsi Papua berkaitan dengan hasil Pilkada Provinsi Papua.

6 Juni

Kendati KPUD Provinsi Papua sudah menetapkan pasangan calon Gubernur Barnabas Suebu – Alex Hesegem sebagai pemenang Pilkada Papua, namun pelantikan terhadap mereka belum dapat dilakukan. Hal ini terutama disebabkan oleh munculnya dugaan ijazah palsu yang dimiliki Suebu. Guna menindaklanjuti dugaan ini, Panmus DPRD telah memerintahkan Pansus Pilkada DPRD Papua untuk membentuk Tim investigasi guna melakukan penelitian terhadap instansi tertentu mengenai ijazah yang dimiliki Suebu mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.

7 Juni

Wakil Ketua DPR Papua Komaruddin Watubun menjelaskan, kendati masih ada pro dan kontra mengenai kemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Suebu dan Hesegem dalam Pilkada Papua 10 Maret 2006, Pemerintah Pusat akan tetap memproses dan melantiknya. Saat ini Pemerintah Pusat sedang memproses SK pelantikannya, lanjut Watubun. Berkas dan surat usulan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Suebu dan Hesegem sudah disampaikan secara resmi kepada Mendagri melalui Sekjen Depdagri pada Rabu 7 Juni 2006, pukul 13.00, WIB.

8 Juni

Untuk mempercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, Barnabas Suebu/Alex Hesegem, wakil Ketua DPR Papua, Komaruddin Watubun, mengeluarkan surat usulan pelantikan ke pemerintah pusat. Sebaliknya, Ketua DPRD Papua John Ibo menganggap surat itu illegal, tidak sah dan liar, sebab surat itu tidak dikeluarkan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di DPRD. Lebih parah lagi, surat ini dibuat di luar Gedung DPRD Papua dan nomor surat ke luar pun ditanyakan melalui telp dari Jakarta kepada salah seorang staf DPRD Papua. Atas tindakan ini, Ibo mengancam mempolisikan wakilnya, Komaruddin Watubun.

9 Juni

Ketidaksepahaman atas terpilihnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2006 – 2011, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem berdampak pada persetujuan di

dalam lembaga legislatif Provinsi Papua. Hal ini nampak pada bagaimana anggota DPRD Papua saling menggugat ke kepolisian. Ada indikasi bahwa kemenangan Suebu/Hesegem dalam Pilkada 10 Maret tidak diterima oleh sebagian anggota DPRD Papua. Bahkan perseteruan ini terjadi pada tingkat ketua dan wakil ketua DPRD. Perseteruan ini dipicu oleh surat usul pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dikeluarkan oleh wakil ketua DPRD, namun dianggap oleh ketua DPRD Papua ilegal.

10 Juni

Mengomentari keterlambatan proses pelantikan pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Barnabas Suebu/Alex Hesegem, Anggota Komisi A DPRD, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua, Ramses Wally menegaskan, pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 10 Maret 2006 merupakan bukti kedaulatan rakyat Papua dalam berdemokrasi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Pasangan Gubernur dan Wakil gubernur terpilih merupakan pilihan hati nurani rakyat Papua, sudah pasti akan dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden, apapun alasan dan persoalan yang dihadapi, karena itu merupakan hasil kedaulatan rakyat Papua. Keterlambatan proses pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bukan sengaja dibuat-buat di DPRD, tetapi ada sejumlah kerikil-kerikil yang masih mengganjal dalam Lembaga DPRD Papua sehingga perlu dikeluarkan terlebih dahulu, baru diusulkan untuk dilantik.

11 Juni

Dalam rangka mencari kebenaran dugaan penggunaan ijazah palsu dari calon Gubernur terpilih Papua Barnabas Suebu, anggota DPRD Papua membentuk Tim investigasi yang terdiri dari 7 orang. Ny. Yani dari Fraksi Gabungan DPRD Papua, selaku ketua Tim investigasi menegaskan, "Timnya berencana mulai melakukan investigasi selama 2 hari mulai 12 – 13 Juni 2006, dan sasaran investigasinya adalah sekolah-sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah untuk Suebu. Namun, sebelum melakukan investigasi, Tim akan terlebih dahulu memanggil Penyelenggara Pendidikan di sekolah-sekolah yang pernah mendidik Suebu, yaitu, Sekolah Dasar Negeri I Sentani, SMP Negeri I Sentani dan SMA Adven Doyo Baru. Hasil dari investigasi ini akan diserahkan kepada Pansus Pilkada dan Panitia Musyawarah (Panmus) di DPRD Provinsi Papua untuk diproses lebih lanjut."

14 Juni

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) meminta Pejabat Gubernur Papua, Sondjuang Situmorang memfasilitasi penyelesaian masalah internal DPRD Papua, dengan mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pendapat agar Gubernur hasil Pilkada Papua dapat segera dilantik.

15 Juni

Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu merencanakan akan mendatangi Mapolda Papua untuk melaporkan ketua DPRD Papua, John Ibo karena telah mencemarkan nama baik dan kehormatan keluarganya dengan menuduh memiliki ijazah palsu. Menurut Suebu, hal ini sengaja dilakukan supaya masalahnya bisa menjadi jelas dan terang. Bukan hanya Ketua DPRD Papua saja yang akan dituntut Suebu, tetapi juga pihak-pihak tertentu yang masih berusaha memfitnahnya dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Suebu juga meminta kepada media yang telah memberitakan keterangan yang tidak benar tentang dirinya untuk segera melakukan permohonan maaf.

Menanggapi perdebatan kasus Pilkada Papua yang terjadi di DPRD Papua, Ketua MRP, Drs. Ague Alua, MTh menegaskan, tindakan itu merupakan upaya mempermalukan diri sendiri. Alasannya, yang meloloskan Barnabas Suebu menjadi calon Gubernur adalah Pansus Pilkada DPRD sendiri, dan sekarang setelah Suebu dan Hese gem menang, malah Pansus DPRD sendiri yang meributkannya, terutama menyangkut ijazah SMA Suebu. Karena itu, Alua meminta kepada DPRD agar tidak melakukan tindakan mempermalukan diri sendiri. Seharusnya Pansus Pilkada DPRD dibubarkan dan dibentuk lagi Pansus baru yang bertugas menyelesaikan masalah Pilkada, apakah itu menangan i dugaan ijazah palsu ataukah menyangkut masalah pengajuan nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke Depdagri.

16 Juni

Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu secara resmi mengajukan Ketua DPRD Papua, John Ibo ke Kantor Pengadilan Negeri Jayapura. Suebu melalui kuasa hukumnya Iskandar Sonhadji menuntut John Ibo sebesar 510 milyar rupiah sebagai ganti rugi atas tindakannya melawan hukum dan penghinaan atau fitnah yang telah dilakukannya terhadap Suebu. Selain itu, Ibo juga harus memulihkan kehormatan, reputasi dan nama baik dengan cara menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada penggugat dan mengumumkan permintaan maaf itu kepada publik melalui dua surat kabar lokal dan nasional dengan ukuran minimal satu halaman penuh.

DPRD Papua meminta Pemerintah untuk memberikan prioritas pada pelantikan pasangan Barnabas Suebu dan Alex Hese gem sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dalam pertemuannya dengan Sekjen Depdagri, Progo Nurdjaman, Ketua Komisi A DPRD Papua, Yance Kayame mengatakan, "Proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu silahkan dilanjutkan, namun proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diprioritaskan, karena Barnabas mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari masyarakat". Selain itu, Kayame juga meminta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Papua yang masih bertikai.

17 Juni

Ketua DPRD Papua, John Ibo, MM mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan John Kabey, salah seorang Tim sukses Suebu/Hese gem, yang mengatakan supaya DPRD Papua mengurus korupsi yang terjadi di dalam Badan Legislatif. Ibo tidak menyangkal bahwa ada anggota DPRD Papua yang korupsi, tetapi bukan sebagai suatu lembaga. Dan apabila ada oknum-oknum tertentu di DPRD Papua yang melakukan korupsi, silahkan menyebutkan namanya. Lanjut Ibo, semua uang yang dipakai anggota Dewan sebagai biaya operasional dan lainnya selalu diaudit Bawasda dan BPK. Tidak ada namanya uang rakyat yang tidak diaudit.

Pejabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi konflik internal yang terjadi di DPRD Papua. Menurut Situmorang, pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut, tanpa mencampuri materi permasalahan. Karena itu Situmorang mengharapkan agar semua pihak melaksanakan ketentuan sesuai dengan fungsi masing-masing dengan saling menghargai dan menghormati, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

20 Juni

Wakil Ketua DPRD Papua, Komaruddin Watubun membantah tuduhan ketua DPRD Papua, John Ibo atas Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, No. 121/149, 7 Juni 2006 yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri sebagai tidak sah (illegal). Menurut Komaruddin, surat ini memiliki kekuatan hukum yang sah, karena didasarkan pada prosedur perundang-undangan seperti yang tertuang dalam UU No 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga PP No 6/2005 tentang pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur serta keputusan DPRD Provinsi Papua No 1/DPRD/2005 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Papua. Dalam pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 UU No 32/2004 dikatakan, "Pengesahan, pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan selambat-lambatnya 30 hari. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi selambat-lambatnya 3 hari kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara Penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan". Oleh karena itu, lanjut Komaruddin, surat usulan pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dikirimnya ke Mendagri adalah sah dan tidak perlu dipersoalkan karena akan menghambat proses pelantikan.

Wakil Ketua MRP Provinsi Papua, Ir. FA. Wospakrik, MSc menegaskan, Majelis Rakyat Papua sebagai representatif kultur orang asli Papua memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pematapan kehidupan kerukunan beragama. Berdasarkan kewenangan itu, MRP mengeluarkan surat rekomendasi No 050/221/MRP/2006 yang ditanda tangani oleh ketua MRP Agus Alua dan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan Bupati/Walikota se-Provinsi Papua sebagai pelaksana Pembangunan supaya diperhatikan dan ditindaklanjuti. Ada 3 point yang direkomendasikan MRP, yaitu: pertama, jiwa dan semangat UU No 21/2001 adalah keberpihakan dan pemberdayaan orang-orang asli Papua dalam segala sektor kehidupan dan usaha di bidang jasa konstruksi dan pengadaan. Kedua, agar semua pihak pemerintah maupun swasta membangun komitmen bersama untuk sungguh-sungguh melaksanakan UU No 21/2001 demi meningkatkan kesejahteraan orang-orang asli Papua yang diproteksi dalam UU tersebut. Ketiga, agar Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota se-Papua mengedepankan komitmen keberpihakan dan pemberdayaan pengusaha-pengusaha asli Papua dengan pembagian 70 persen untuk orang asli Papua dan 30 persen untuk non Papua dengan mengutamakan komitmen masal dan profesionalisme para pengusaha Papua menurut klarifikasi perusahaan-perusahaan mereka.

21 Juni

Menanggapi perseteruan antara Barnabas Suebu dan John Ibo, Sekretaris Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid meminta agar perseteruan itu diselesaikan secara adat (kekeluargaan) dengan duduk di para-para adat. "Sebagai anak-anak adat yang berasal dari daerah Sentani, hendaknya keduanya harus berbesar hati untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak bertambah panjang. Rencananya keduanya akan kami pertemukan dalam Sidang Adat 27 Juni 2006", terang Thaha.

Sejumlah elemen mahasiswa Papua se-Indonesia mendesak Presiden RI agar segera melantik Suebu dan Hesegem sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui juru bicaranya, Laus DC Rumayom, mereka menegaskan bahwa Suebu dan Hesegem adalah pasangan yang sudah dipilih secara demokratis dalam Pilkada 10 Maret 2006;

dan terkait dengan gugatan yang dilakukan calon lain telah diputuskan Mahkamah Agung dengan memenangkan KPUD Papua dalam sengketa Pilkada Papua dengan menolak semua permohonan calon. Mereka juga meminta Majelis Rakyat Papua untuk segera membuat pernyataan politik yang tegas terkait dengan diulur-ulurnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih.

23 Juni

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura menetapkan jadwal sidang gugatan perdata Gubernur terpilih Papua, Barnabas Suebu, SH terhadap Ketua DPRD Papua, John Ibo, MM. Jadwal sidang gugatan ini akan mulai digelar 26 Juni 2006.

24 Juni

Gugatan pidana dugaan pencemaran nama baik Barnabas Suebu terus saja berjalan. 6 saksi telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. John Kabey sebagai ketua Tim sukses Suebu/Hesegem dan sekaligus saksi juga diperiksa Tim penyidik Polda Papua.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP), Vitalis Yumte meminta Presiden RI segera mengeluarkan surat keputusan tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Barnabas Suebu dan Alex Hesegem. Mekanisme Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah sah, apalagi keputusan MA pun mempunyai kekuatan hukum tertinggi dalam Negara ini. Maka tidak ada alasan untuk tarik-ulur hasil Pilkada. Ketidakpastian SK dan waktu pelantikan sangat mempengaruhi seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi DPR Papua telah mensahkan APBD 2006 sebesar Rp 4 triliun, terang Tumte.

26 Juni

Menanggapi semakin tidak jelasnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Barnabas Suebu/Alex Hesegem, Ketua Komisi A DPRD Papua, Yance Kayame menilai penyebabnya adalah KPUD Papua. Menurut Yance, sampai sekarang Komisi A DPRD Papua belum menerima dan mengetahui kepada siapa sebenarnya KPUD Papua menyerahkan hasil pleno KPUD maupun hasil keputusan MA. Oleh karena itu, Komisi A sebagai yang berkompeten meminta kepada KPUD Papua supaya menyerahkan semua hasil pleno KPUD dan hasil keputusan MA kepada DPRD melalui Pansus Pilkada, selanjutnya Panmus akan menetapkan jadwal .

Ketua Presidium Dewan Papua, Tom Beanal meminta agar Presiden RI segera melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua. Alasannya adalah tuntutan masyarakat yang sangat mendesak. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua merupakan permintaan dan penantian masyarakat adat di Papua. Karena itu, hendaknya DPR mengambil kebijakan yang pasti menyangkut pelantikan tersebut. DPR sebagai perwakilan rakyat harus benar-benar mengaspirasikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan kelompok atau pribadi.

28 Juni

Wakil I Ketua DPRD Papua, Komaruddin Watubun menyesalkan surat Mendagri kepada DPRD yang mengatakan agar DPRD melakukan proses ulang usulan pengesahan pengangkatan Gubernur Papua terpilih berdasarkan hasil pleno KPUD Provinsi Papua. Watubun meyakini bahwa surat yang dikirimnya ke Mendagri sudah berdasarkan peraturan. Karena itu, dia menilai Mendagri bisa diklaim ikut bermain di "air keruh".

C. Pengadilan Kasus Abepura 16 Maret 2006

6 April

Kapolda Papua, Irjen polisi Drs. Tommy T. Jakobus menyerahkan berkas pertama 15 tersangka kasus bentrok Abepura 16 Maret kepada Kejaksaan Tinggi. Nama-nama tersangka yang berkasnya diberikan adalah berkas I: Selpius Bobii. Berkas II: Luis G. Berkas III: Ferdinan Pakage. Berkas IV: Ellyas T. Berkas V: Penius W, Thomas U, Patrisius A, Markus K. Berkas VI: Othen D, Musa A, Moses L, Elkana L, Mathias MD, Nelson R dan Mom Jefri Pawika.

16 April

Jefrison Pagawak, satu dari 19 nama yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Papua dengan tegas membantah keterlibatannya dalam kasus bentrok di Abepura pada 16 maret 2006. Dia mengatakan bahwa saat terjadi bentrok di depan kampus Universitas Cendrawasih itu, dirinya sedang berada di Timika.

17 April

Markus Haluk yang adalah salah satu nama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mendatangi Polda Papua untuk memberikan penjelasan tentang keberadaannya sewaktu terjadi kasus bentrok Abepura 16 Maret. Pemeriksaan dimulai pk. 10.15 - 16.00 WIT. Setelah selesai pemeriksaan, Haluk diizinkan meninggalkan markas Polda Papua.

27 April

Di Sarmi, enam orang polisi menangkap Aris Mandowen (23) tanpa surat perintah penangkapan karena namanya termasuk DPO kasus Abepura 16 Maret 2006.

28 April

Polda Papua kembali mengirim 4 berkas kasus Abepura ke Kejaksaan Tinggi Papua. Keempat berkas yang baru dikirim itu adalah berkas milik 4 tersangka yang baru ditangkap, yaitu: Bensiur Mirin, M. Kaitam, Y. Echo Merano B. dan Pieter Stevanus Buinei.

8 Mei

Kejaksaan Tinggi Jayapura menyerahkan 16 tersangka kasus bentrok Abepura 16 Maret kepada Pengadilan Negeri Jayapura.

11 Mei

Sekitar pk. 18.00 WP Sem Wandik ditangkap oleh seorang anggota Brimob bernama Surianto di depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Papua (USTP) tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan.

12 Mei

Kira-kira pk. 24.00 WP Steven Wandik ditangkap di asrama GKI Pdt. S. Liborang, Padang Bulan, Jayapura. Steven ditangkap oleh satuan intel Polda Papua yang langsung masuk dan mendobrak pintu depan asrama dan langsung menuju kamar tidur Steven. Mereka mendobrak pintu kamarnya dan menodongkan senjata laras panjang kepada Steven.

17 Mei

Kasus bentrok di depan kampus UNCEN 16 Maret 2006 mulai disidangkan. Dari 16 orang terdakwa, 11 orang menolak dakwaan dan hanya 5 orang yang menerima dakwaan.

Penasihat Hukum terdakwa kasus bentrok Abepura meminta agar para terdakwa dipindahkan ke LP Abepura. Permintaan ini diajukan menyusul adanya tindakan penganiayaan terhadap para terdakwa yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi sebelum dan sesudah persidangan.

22 Mei

Beberapa tersangka kasus bentrok Abepura 16 Maret untuk kedua kalinya menolak keterangan para saksi dan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan keterlibatan mereka dalam kasus bentrok tersebut. Para tersangka yang menolak itu adalah, Selfius Bobii, Markus Kayame, Patrisius Aronggear, Thomas Ukago, Penius Waker, Ferdinandus Pakage dan Luis Gedi.

24 Mei

Sidang lanjutan kasus Bentrok Abepura 16 Maret kembali digelar. Dalam sidang ini, penasihat hukum keenam terdakwa kasus bentrok Abepura menolak semua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para penasihat Hukum keenam terdakwa menilai semua dakwaan terhadap 6 terdakwa mengenai unsur-unsur pidananya tidak jelas, kabur, tidak tepat dan tidak lengkap. Karena itu dakwaan dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Satu orang terdakwa, Jefri Pawika jatuh pingsan setelah sidang ini usai.

31 Mei

Sidang kasus bentrok Abepura pada 16 Maret 2006 kembali digelar. Agenda utamanya adalah tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum terhadap surat dakwaan atas nama terdakwa Elias Tamaka. Dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Elias Tamaka. Alasannya, apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tentang ketidak-jelasan, ketidak-cermatan, serta ketidak-terangan atas surat dakwaan terdakwa Elias Tamaka tidak tepat dan tidak benar, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

6 Juni

Kepolisian Daerah Papua masih terus memburu lima orang yang dianggap tokoh utama dalam kasus demonstrasi 16 Maret 2006 di depan kampus Universitas Cendrawasih Abepura, Jayapura Menurut Paulus Waterpauw, Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, kelima orang itu adalah, Arnold Omba, Kosmos Yual, Henny Lani, Hans Gebze dan Jefri Pagawak. "Sampai kapanpun kami akan terus memburu kelima tokoh yang diduga berada di balik aksi demo yang menginginkan kegiatan operasional PT Freeport di Tembagapura ditutup", tukas Kombes Waterpauw.

7 Juni

Sidang kasus Abepura 16 Maret 2006 masih terus dilanjutkan. Majelis Hakim yang dipimpin Morris Ginting SH dan didampingi A. Lakoni dan Denny D. Sumadi menolak seluruh eksepsi penasihat Hukum para terdakwa dan meminta Jaksa Penuntut Umum melanjutkan perkara. Para terdakwa yang hadir pada sidang ini adalah Othen Dapyal Cs, Selpius Bobiii, Markus Kayame, Cs, Ferdinand Pakage dan Luis Gedi.

12 Juni

Sidang kasus bentrok Abepura kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Agenda utama sidang ini adalah mendengarkan keterangan para saksi. Saksi yang dihadirkan adalah yang berkaitan dengan perkara terdakwa Othen Dapyal Cs, Selpius Bobii, Elyas Tamaka dan Bensiur Mirin. Semua terdakwa menolak semua keterangan para saksi.

19 Juni

Sidang kasus bentrok Abepura kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang ini menghadirkan 2 orang terdakwa, yaitu Selpius Bobii dan Luis Gedi dan para saksi dari 2 orang terdakwa. Agenda utama sidang adalah mendengarkan keterangan para saksi dari kedua terdakwa.

D. Konflik PT. Freeport Indonesia

2 April

Akademisi Universitas Cenderawasih, Yohanes Rante M.Si, mengemukakan bahwa PT Freeport harus berpihak pada Kesejahteraan rakyat. Maka untuk menutup PT Freeport baginya perlu dipikirkan baik-baik secara matang. Yang paling perlu adalah mengevaluasi peran kontribusi PT Freeport khususnya bagi ekonomi masyarakat Papua dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Peristiwa lakalantas tunggal yang terjadi di jalan antara Tembagapura menuju Timika, tepatnya di Mil 53 pada minggu (2 April) sekitar pukul 05.45 wit memakan korban jiwa, diduga karena rem mobil blong dan mobil masuk jurang tiga orang anggota satgas Pam PT. Freeport Indonesia yang menggunakan mobil itu mengalami naas. Bahkan satu di antaranya, yakni Sertu Taryoko tewas seketika. Dua korban lainnya Sertu Jiono dan Pratu Jainudin tidak mengalami luka berat karena masih dapat meloloskan diri. Keduanya menjalankan proses pemulihan di barak Linud Kostrad 501 Tembagapura.

4 April

Dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang meminta PT Freeport Indonesia di Timika ditutup, MRP mengeluarkan rekomendasi yang tertuang dalam keputusan MRP No 08/MRP/2006. Ketua MRP Agus Alua mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat Papua yang menghendaki agar perusahaan pertambangan PT Freeport ditutup, ada 4 butir penting yang menjadi rekomendasi MRP salah satunya meminta PT Freeport ditutup.

6 April

Pejabat Gubernur Dr. Sodjuangon Sitomorang, M.Si. setuju dengan rekomendasi dari MRP bahwa kontrak karya PT Freeport Indonesia perlu dievaluasi. Kalau PT Freeport di evaluasi maka yang harus dilihat adalah aspek lingkungannya serta kontribusinya terhadap masyarakat setempat dan terhadap negara, tetapi untuk hal itu wewenang ada pada antara pemerintah pusat dan PT Freeport.

14 April

Komnas HAM Pusat melaporkan hasil temuan mereka soal PT Freeport kepada Pemerintah Provinsi Papua. H. Amidhan, Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Komnas HAM Papua, mengatakan ada dua hal yang telah diselidikinya, yaitu (1) sejauh mana penanganan hak-hak dasar atau kebutuhan dasar dari masyarakat; (2) adaptasi masyarakat Kabupaten Mimika misalnya kebutuhan dasar di bidang

pendidikan, kesehatan, rasa aman dan hak-hak dasar kesejahteraan lainnya. Pihak PT Freeport sendiri menjelaskan bahwa kepada masyarakat hukum adat (7 suku) yang memiliki hak ulayat telah diberikan dana yang disebut rekognisi, juga dana yang disebut dana perwalian serta dana kemitraan sebesar 1 persen. Karena itu Komnas Ham mengajurkan agar dana ini diaudit sedemikian rupa supaya terdapat transparansi terhadap masyarakat bagaimana pengelolaan dana itu dan harus ditunjukkan kepada semua pihak kemana saja dana itu, sudah menyentuh benar-benar kepada masyarakat.

18 April

Karena tak segera tuntasnya penyelesaian masalah Freeport secara menyeluruh mulai dari peninjauan kontrak karya hingga penutupan PT Freeport membuat Pansus Freeport DPRP harus menggandeng pakar hukum dari Universitas Indonesia dalam rangka melakukan kajian-kajian hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah Freeport. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus Freeport DPRP Yan Ayomi.

19 April

Ramses Wali, anggota Komisi A DPRP, menegaskan bahwa pertemuan Pansus Freeport DPRP dengan Manajemen PT Freeport tidak perlu dilakukan di luar Papua mengingat DPRP memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak berkompeten, selain itu pihaknya mempertanyakan darimana biaya perjalanan itu diperoleh.

20 April

Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mendesak agar lembaga penampung aspirasi rakyat atau DPRP untuk segera melakukan sidang menangani penutupan PT Freeport sebagaimana aspirasi yang disampaikan berbagai element masyarakat. Demikian dikatakan oleh Sekjen AMPTP Hans Magai.

21 April

Permintaan AMPTPI ditanggapi oleh dua anggota DPRP Marthen Marey dan Ramses Wali dengan mengatakan agar semua pihak agar bersabar dan memberikan waktu kepada DPRP untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

23 April

Adanya tuduhan miring terhadap Pansus Freeport DPRP dibiayai oleh manajemen PT Freeport dibantah keras oleh salah satu anggota Pansus Freeport DPRP, Marten Marey. Dijelaskannya bahwa biaya anggaran kerja pansus adalah biaya langsung dari Pemerintah Propinsi Papua.

27 April

Wakil Menteri Perdagangan AS, David A Samson, meminta RI menghormati kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan Amerika, di antaranya PT Freeport Indonesia. Wakil menteri perdagangan mengatakan hal itu usai bertemu dengan Wapres Yusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden.

28 April

PT Freeport Indonesia akhirnya angkat bicara soal transparansi pengelolaan tambang di Papua. "Setiap tiga bulan kami memberikan data ke pemerintah jadi pemerintah tahu persis berapa konsentrat yang kami hasilkan dan berapa yang kami produksi," demikian dikatakan oleh Senior Corporate Communication Manager Freeport Indonesia Siddharta Moersjid.

27 April

Dalam sambutannya pada acara diskusi tentang Freeport di Hotel Sheraton Timika, ketua DPR RI Agung Laksono menegaskan, kontrak karya PT Freeport Indonesia perlu dievaluasi dan ditinjau kembali dengan mempertimbangkan realitas di lapangan. Kontrak karya dapat disempurnakan, akan tetapi PT Freeport Indonesia sebagai investasi pertambangan di Indonesia harus dipertahankan eksistensinya.

29 April

Merasa tidak puas dengan keberadaan Freeport, masa dari Desa Kimbeli, Banti dan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika mengamuk dan membakar 4 mobil dan merusak 3 bangunan milik PT Freeport. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIT, akibatnya 4 karyawan dan seorang anggota Brimob dilarikan ke rumah sakit Tembagapura.

31 April

Pemerintah Provinsi Papua merencanakan akan membeli saham PT Freeport Indonesia. Hal ini menurut pejabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang harus dirundingkan terlebih dahulu dengan DPRP. Tujuan menanam saham pada PT Freeport adalah meningkatkan pendapatan daerah.

Setelah melalui tahap penyidikan, Polisi menetapkan 5 tersangka kasus pengrusakan kantor Freeport dan pembakaran 4 unit mobil yang terjadi pada 29 April. Nama-nama tersangka adalah Kalianus Magai (29), Militer Elas (24), Era Elas (19), Edi Magai (18), dan Aponi Alom (18).

1 Mei

Kapolda Papua Irjen Polisi. Drs. Tommy Trider Jacobus menyesalkan aksi anarkis yang terjadi di PT Freeport beberapa waktu lalu oleh masyarakat yang merusak kendaraan milik PT Freeport. Kapolda menyesalkan hal ini karena PT Freeport tidak mengindahkan saran dari polisi. Polisi menyarankan agar tidak boleh mendatangkan massa dalam jumlah yang banyak untuk menghadiri acara ulang tahun Ring Top Papua ke-6 di Sport Hall Mile 68 Tembagapura. Bupati Mimika juga menyesalkan aksi ini sebagai akibat keteledoran pihak PT Freeport.

Salah satu Akademisi Universitas Cendrawasih Drs. Y Rante, MSi. menyikapi bahwa tepat jika Pemerintah Provinsi Papua memiliki saham PT Freeport. Saham itu akan memberikan banyak kontribusi terhadap anggaran pembangunan Papua.

3 Mei

Dalam laporan berjudul "Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua", Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mendesak pemerintah agar membentuk panel independen untuk PT. Freeport Indonesia. Tugas panel ini adalah memetakan sejumlah skenario bagi masa depan Freeport, termasuk tanggal penutupan tambang, pengolahan, dan pengelolaan limbah. Selain itu pemerintah juga harus menyewa konsultan independent untuk mengkaji setiap skenario dari segi sosial dan teknis. Kajian ini harus digunakan sebagai dasar pembahasan tentang masa depan tambang oleh penduduk lokal dan pihak berkepentingan lain.

9 Mei

Solidaritas Rakyat Untuk Kasus Mile 72 Tembagapura Timika akan menggelar seminar Nasional tentang dampak kehadiran PT Freeport Indonesia terhadap rakyat Papua. Seminar ini dimaksud untuk menyatuhkan persepsi dan mendesak penutupan PT Freeport Indonesia. Ketua Solidaritas Untuk Kasus Mile 72 Tembagapura Timika – Papua Markus Haluk, seminar ini memberikan pemahaman terhadap rakyat Papua dengan mengkaji secara ilmiah atas berbagai persoalan yang dilakukan PT Freeport Indonesia selama beroperasi di Tanah Papua. Seminar direncanakan dilaksanakan di aula utama Uncen pada tanggal 12-13 Mei 2006.

10 Mei

Panitia Kerja Komisi VII DPR RI melakukan konferensi pers di Gedung DPR tentang hasil temuan mereka ketika mengadakan kunjungan ke PT Freeport Indonesia. Ada 2 penyimpangan yang mereka temukan dalam kunjungan ini. Pertama, kerusakan lingkungan yang luar biasa, seperti sungai yang berubah kondisinya dan mengancam kelangsungan ekosistem karena menjadi saluran tailing. Kedua, data perhitungan devisa yang tak masuk akal.

11 Mei

Tim kunjungan Lapangan Panja PT Freeport DPR RI menilai perlunya kontrak kerja ulang atas Freeport Indonesia di Timika, Papua. Meski belum menjadi sikap resmi DPR tim akan menyampaikan temuan ini ke Komisi VII DPR. “Banyak fakta penting di lapangan yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kerja Freeport di Timika selama ini”, kata Ketua Tim Tjatur Sapto Edy.

15 Mei

Perwakilan Komisi Nasional HAM Papua, Albert Rumbekwan menyesalkan langkah kepolisian Daerah Papua yang melarang penyelenggaraan seminar tentang Freeport Indonesia. Menurutnya, larangan ini dinilai sebagai mundurnya kebebasan berekspresi di Papua. Larangan ini tertera dalam surat bernomor B / 909.V / 2006 / Intelkam. Angka 2 huruf b, ayat 1 surat ini berbunyi, “Tidak dapat menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan melarang untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.”

26 Mei

Rencana Keberangkatan Pansus DPRP ke Amerika awal Juni mendatang disorot oleh Ramses Wally Komisi A DPRP sebagai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi alokasi anggaran untuk kegiatan pembiayaan pansus sebesar Rp 5 miliar lebih bersumber dari APBD yang seharusnya diperuntukan bagi kepentingan rakyat Papua. “Untuk penyelesaian masalah yang kompleks lebih baik di dalam negeri saja”, katanya.

2 Juni

PT Freeport Indonesia dinilai telah melakukan penghinaan terhadap orang Papua, khususnya kepada mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penghinaan ini dilakukan dengan hanya memberikan bantuan sebesar Rp 16 juta dan 15 karung goni beras. “Padahal ada mahasiswa Papua yang juga menjadi korban gempa”, ujar Hans Maniburi, perwakilan Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Mereka menganggap PT Freeport tidak adil, sebab kepada korban gempa Yogyakarta, mereka memberi bantuan sebesar Rp. 1 milyar, sementara kepada mereka (mahasiswa asal Papua di Yogyakarta) hanya diberi bantuan sebesar Rp 16 juta.

5 Juni

Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat melakukan aksi demonstrasi menuntut PT Freeport Indonesia ditutup. Dalam orasinya, mereka menuntut agar alam dan adat Papua tidak dirusak dan dieksploitasi, khususnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Mereka menghendaki agar penyelesaian masalah Freeport dilakukan dengan dialog segitiga antara Pemerintah Indonesia, masyarakat Papua dan PT Freeport Indonesia. "Pertemuan segitiga ini harus dilakukan secara terbuka di hadapan rakyat Papua untuk menghindari upaya terselubung yang cenderung mengatas-namakan orang Papua dan untuk menunjukkan kepada publik bahwa di Papua benar-benar ada demokrasi", tegas juru bicara Arkilaus Baho.

22 Juni

Anggota Komisi E Ramses Walli menegaskan dengan berakhirnya masa kerja Pansus PT Freeport DPRP maka pansus tersebut harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas tentang hasil kerjanya kepada lembaga DPRP maupun pada masyarakat Papua pada umumnya. Pansus dibentuk sesuai keputusan panitia musyawarah (Panmus) DPRP dengan tiga tugas utama yakni : mengumpulkan data, membahas serta mengkaji data terkait persoalan PT Freeport, kemudian data tersebut menjadi bahan pertimbangan dewan yang ditindaklanjuti menjadi keputusan DPRP.

23 Juni

Pengamanan Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga PT. Freeport Indonesia di Timika yang selama ini dilakukan pasukan TNI, mulai Juli 2006 secara aktif dikoordinasi oleh kepolisian. Hal ini merupakan amanat dari otoritas perusahaan sendiri. Untuk menjalankan amanat ini, jelas Wakil Kepolisian Daerah Papua, Brigadir Jenderal Max Donal Aer, kita telah menyiapkan rencana untuk menggelar operasi pengamanan yang dinamakan operasi Amole. Inti dari operasi Amole adalah program-program pencegahan berbentuk pembinaan masyarakat dan penegakan hukum serta peningkatan tenaga pengamanan internal perusahaan sendiri, baik dari segi kekuatan, kualitas maupun kemampuannya.

29 Juni

Pengamanan (Pam) Obyek vital PT Freeport Indonesia di Timika yang selama ini ditangani oleh TNI mulai awal Juli akan diambil alih oleh Polri. Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus mengatakan pengalihan pengamanan Freeport dari TNI ke Polisi ini menyusul adanya keputusan Presiden (Keppres) No 63 Tahun 2004 tentang pengamanan (Pam) pada obyek vital nasional yang tidak lagi ditangani oleh TNI. Untuk memperlancar pengamanan di perusahaan tambang Freeport di Timika Mabes Polri telah mengirim sebanyak 600 personil Brimob dari kelapa dua Jakarta, personil lama dikembalikan ke posnya semula.

E. Pertahanan dan Keamanan

6 April

Bendera Bintang Kejora berkibar di halaman gedung Rektorat Universitas Cendrawasih - Waena, Jayapura. Selain itu oknum-oknum tak dikenal ini juga berusaha untuk membakar gedung rektorat. Beruntung api yang berkobar bisa dipadamkan. Berkaitan dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari ketiga saksi yang merupakan satpam di gedung itu, yaitu: Surono (57 tahun), Abdullah Matdoan (66 tahun) dan Amos (22 tahun).

10 April

Serangan brutal oleh kelompok bersenjata terhadap mahasiswa dan anggota TNI yang sedang melakukan pengobatan massal terjadi di Kampung Wembi Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Serangan ini mengakibatkan 4 orang tewas, satu kritis dan dua orang luka-luka. Terkait dengan peristiwa ini, Panglima TNI, Djoko Suyanto mengatakan, "Serangan ini kemungkinan dilakukan anggota OPM. Serangan ini merupakan rangkaian dari upaya OPM untuk memperjuangkan keinginan separatisnya. Peralatan yang digunakan sangat canggih seperti: senjata api, senjata genggam, panah dan kampak."

11 April

Berkaitan dengan peristiwa Wembi yang menewaskan 2 anggota TNI dan 2 orang yang diduga kelompok penyerang, Direktur Perwakilan Komisi Nasional HAM Papua, Albert Rumbekwan menegaskan, "TNI dan POLRI dalam melakukan penyisiran terhadap kelompok OPM hendaknya jangan sampai merugikan warga sipil. Aparat seharusnya memiliki data dan informasi yang akurat mengenai pelaku penembakan tersebut." Sedangkan, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, "Operasi intelijen di Papua akan ditingkatkan, saat ini kami sedang melakukan pengejaran sesuai dengan instruksi Presiden. TNI akan melakukan segala tindakan secara terukur termasuk dalam hal mengejar pelaku penyerangan."

Didampingi oleh Danrem 172/PWY, Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen. TNI George Toisutta, mengunjungi lokasi penyerangan di Desa Wembi, Distrik Arso, dan mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala kampung, Pastor Paroki Arso Kota, Willem Sinawil pr, Wakil Bupati Keerom. Dalam pertemuan ini Pangdam menegaskan agar para tokoh masyarakat membantu proses pencarian senjata yang diambil oleh OPM. Selain itu, pihaknya menegaskan supaya diadakan penyisiran guna mencari senjata yang hilang dan pelaku penyerangan. Untuk itu masyarakat diminta tidak pergi jauh ke dusun-dusun mereka guna menghindari salah paham dengan TNI.

11 April

Satuan TNI Yonif 751 yang menggantikan kedudukan Yonif 509 di Wembi segera melakukan penyisiran di sekitar pos TNI di Wembi guna mencari pelaku penyerangan. Mereka mengaku menemukan peralatan masak dan dokumen OPM yang tertinggal di lokasi tak jauh dari pemukiman warga.

15 April

Dua warga masyarakat Wembi ditangkap oleh satuan TNI Yonif 751 dan ditahan di Pos Yonif 509 di Arso Kota. Mereka diinterogasi secara maraton.

16 April

Menurut pihak Danrem yang dijumpai oleh Pastor Paroki Arso, Willem Sinawil pr dan Direktur SKP, J. Budi Hernawan OFM, warga tersebut hanya dimintai keterangan dan akan dilepaskan pada hari tersebut. Keterangan ini terbukti benar.

Upaya pengejaran terhadap para penyerang di Desa Wembi Distrik Arso, Kabupaten Keerom masih terus dilakukan. Senjata yang dirampas harus direbut kembali, sebab bila tidak akan membahayakan masyarakat terutama aparat keamanan, tegas Danrem 172/PWY Kolonel Inf. Asis Wanto.

29 April

Unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua ditandai dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di depan Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sydney. Sekitar 25 orang ikut serta dalam kegiatan pengibaran bendera ini. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bagian dari unjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua.

31 April

Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Corinus Berotabui, S.Th. menanggapi tuduhan bahwa gereja-gereja ikut menyuarakan gerakan separatis di Papua. Ia menegaskan bahwa berdasarkan visi dan misi gereja-gereja di tanah Papua yang antara lain: damai, suka cita, keadilan, kebenaran, maka ketika masyarakat ditindas, dianiaya, martabat diinjak-injak, haknya dirampas, gereja menyuarakan suara kenabiannya yaitu menyuarakan hak-hak rakyatnya.

1 Mei

Para tokoh pejuang Papua sangat menyesalkan pengibaran Bendera Bintang Kejora di Konsulat Jendral RI di Sydney. Ramses Ohee pelaku sejarah perjuangan integrasi Papua dalam kesatuan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), mengatakan bahwa sejak 1 Mei 1963 Papua sudah masuk dalam Ibu pertiwi Indonesia. Masyarakat dunia sudah mengakuinya maka tetaplh mempertahankan keutuhan itu, dengan melihat bersama masalah Otsus saat ini dan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Kerja sama mengelola dana Otsus juga harus ada transparansinya agar masyarakat jangan berteriak menuntut hak mereka di tanah sendiri. Ini mungkin bisa menjadi satu jawaban terkini untuk menciptakan suasana Papua yang bebas korupsi dan cinta akan perdamaian.

5 Mei

Aparat Kepolisian memulangkan 7 warga PNG yang ditangkap pada 3 Mei karena tidak memiliki Kartu Lintas Batas (KLB). Ketujuh orang itu terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 perempuan. Kapolresta Jayapura Taufik Pribadi mengatakan bahwa Mereka ditangkap di Tanah Hitam Abepura, di dalam taksi saat anggotanya melakukan patroli.

17 Mei

Terkait dengan pecahnya perang antar suku di Distrik pemekaran Pogoma (suku Lem, Dawa dan Wano), Puncak Jaya, yang menewaskan 3 orang, Anggota DPRD Puncak Jaya Ruben Magai menegaskan, walaupun aparat kepolisian telah mengatasi masalah ini, dia tetap berharap agar masyarakat membuat upacara "bakar batu". Hal ini dimaksudkan agar persoalan perang antar suku bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebab selama upacara adat ini tidak dibuat, besar kemungkinan peristiwa yang sama akan terjadi kembali.

21 Mei

Kapolda Papua melalui Kabidhumas, Kombes Pol. Drs. Kartono Wangsadisastra merencanakan akan mengumpulkan semua polisi yang menjadi ajudan pejabat, baik provinsi maupun daerah. Menurutnya, rencana ini dibuat dalam rangka penyegaran para ajudan. Sebab dinilai naluri kepolisian para ajudan sudah mulai kurang, bahkan ada yang sudah tidak seperti polisi lagi, baik dari cara bersikap, berpakaian dan sebagainya.

28 Juni

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Papua selalu menjadi sorotan pihak asing, sehingga perlu kepedulian semua pihak untuk terus meningkatkan daya

mampu, khususnya dalam hal kepemimpinan sipil. Layaknya sebagai bagian negara yang masih terpencil, Papua akan tetap menjadi sorotan asing. Sorotan asing itu bisa berupa kehadiran secara fisik tetapi juga dalam bentuk kepedulian berupa suara-suara di Parlemen dan Pemerintahan, seperti di Australia dan Amerika Serikat. Untuk daerah Papua, lanjut Sudarsono, perlu pendekatan manusiawi untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polisi boleh bersikap tegas, tetapi harus dilakukan secara proporsional melalui pendekatan persuasif.

II. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

F. Kasus-kasus Korupsi

4 Mei

Kapolda Papua meminta izin kepada Presiden RI untuk memeriksa John Tabo, Bupati Tolikara saat ini, terkait kasus korupsi di Kabupaten Jayawijaya semasa Beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Jayawijaya.

15 Mei

Upaya penangkapan kembali Bupati non aktif Jayawijaya, Drs. David A. Hubi, terdakwa kasus penyalahgunaan dana APBD dalam pengadaan pesawat Foker 27 seri 600 senilai 8 milyar rupiah lebih berakhir bentrok. Bentrok yang terjadi antara para warga pendukung Hubi dengan aparat kepolisian menelan korban jiwa dan luka-luka. Dua orang warga pendukung Hubi tewas tertembak, satu orang mengalami luka parah, satu orang dari aparat kepolisian terkena panah. Sementara 153 warga pendukung Hubi juga ikut diamankan aparat. Berkaitan dengan peristiwa ini, Polda Papua langsung mengirim 16 personel Brimob POLDA Papua ke Wamena

Sementara itu, kuasa hukum Hubi, Bernad Akasian mengancam keras tindakan aparat yang memanggil paksa kliennya (Hubi). Lebih disayangkannya lagi adalah akibat dari tindakan itu yang menelan korban jiwa dan luka-luka. Dia menilai tindakan ini sebagai bentuk arogansi aparat. Sebab menurutnya, Polda Papua sangat lamban mengambil sikap terhadap masalah ini.

16 Mei

Polda Papua kembali mengirim 1 Satuan Setingkat Pleton (SST) ke Wamena. Berkaitan dengan penambahan pasukan ini, kapolda Papua mengatakan, penambahan pasukan ini dimaksudkan untuk mengamankan situasi pada saat dua korban yang meninggal dikuburkan.

7 orang akhirnya jadi tersangka kasus bentrok yang terjadi antara pihak kepolisian dengan warga pendukung Hubi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selain itu polisi juga masih mengejar 17 orang yang diduga sebagai provokator. Berkaitan dengan kasus ini, anggota DPR Papua asal Jayawijaya Paul Sumino, menilai pemanggilan secara paksa terhadap Hubi sudah masuk dalam lingkup politik, bukan hukum semata. Ada usaha dari lawan politik Hubi untuk tetap memproses kasus Hubi di pengadilan sementara dari sisi hukum kasus ini sebenarnya belum jelas.

Sementara itu Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua menyatakan, "Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wamena Purwanto harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang

menelan korban”. Sebab menurut Komnas HAM penjemputan paksa Hubi adalah perintah sepihak Purwanto yang tidak disetujui dua anggota majelis lainnya.

17 Mei

Menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari penjemputan secara paksa David Hubi, Bupati Jayawijaya (non aktif) yang menewaskan 2 orang, Hubi menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses hukum.

18 Mei

Berkaitan dengan peristiwa penangkapan secara paksa terhadap bupati (non aktif) Jayawijaya David Hubi, Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Kecil Wilayah Pegunungan Tengah mendesak Polda Papua agar kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya segera diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya David Hubi yang diproses secara hukum.

22 Mei

Aparat kepolisian Polres Jayawijaya kembali menemukan satu tersangka bentrok antara massa pendukung Hubi dengan aparat kepolisian. Jumlah tersangka kasus pemanggilan secara paksa Hubi kini menjadi delapan orang.

29 Mei

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua mengaudit dana pembangunan landasan pacu Bandara Domine Eduard Osok, Sorong. Dari hasil audit itu ditemukan indikasi terjadi dugaan korupsi.

7 Juni

Sekda Kabupaten Yapen diduga menyalahgunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2006 sebesar Rp 76 milyar. Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengatakan, “Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tim Serse Polda Papua yang diterjunkan ke Serui, ibukota Kabupaten Yapen pertengahan Mei, terungkap bahwa Sekda Kabupaten Yapen menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Ia diduga melanggar pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang korupsi. Untuk pasal 2 telah terbukti bahwa ia melawan hukum, sebab selain dana tersebut belum disahkan DPRD Kabupaten Yapen, juga tidak ada izin untuk mengeluarkan dana tersebut oleh Bupati setempat. Sementara untuk pasal 3 masih harus dilakukan koordinasi dengan BPKP, Bawasda dan Kejaksaan”.

8 Juni

Bupati non aktif Jayawijaya David Hubi secara resmi melaporkan Wakil Bupati dan Sekda Jayawijaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan pemeriksaan atas pencairan dana Rp. 10 M untuk bantuan keperluan angkutan pesawat.

10 Juni

Bertempat di Hotel Relat Indah, Jayapura, Papua Corruption Watch, sebuah organisasi advokasi untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi di tanah Papua dideklarasikan. Menurut Pejabat Gubernur Papua Dr. Sondjuangon Sitomorang, “Kebijaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah secara normatif juga membawa konsekuensi semakin jelas dan terbukanya akses ruang partisipasi warga masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah dan proses Pemerintahan Daerah. Terwujudnya proses itu sangat tergantung pada kualitas penerapan prinsip “good governance”, terutama dalam aspek

peran serta publik, keterbukaan dan tanggung jawab publik yang juga menjadi peran utama yang termuat dalam UU OTDA, UU Perimbangan dan UU OTSUS. Untuk mencapai tujuan ini, kehadiran Papua Corruption Watch (PCW) sebagai salah satu institusi yang menyatakan kepeduliannya pada berbagai tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan.” Sementara Koordinator PCW M. Rifai Darus, SH mengatakan, “Untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi di Tanah Papua, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan”. Darus mengharapkan kehadiran organisasi ini mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat, sehingga secara bersama-sama mengurangi praktek-praktek korupsi.

12 Juni

Enam orang oknum pegawai PLN Cabang Jayapura diperiksa Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua. Diduga bahwa mereka telah memanipulasi pembelian mesin pembangkit tenaga listrik pada program pengadaan listrik pedesaan 2003 – 2004 senilai 41 milyar rupiah. Namun, AS Intel Kejati Papua, Sendjung Manulang, SH. MH mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tiga Perusahaan rekanan PLN Cabang Jayapura, yaitu Perusahaan UT, NT dan BMJ, yang melakukan pengadaan mesin-mesin tersebut, belum ditemukan indikasi adanya bukti pembelian mesin bekas. Ketiganya mampu menunjukkan surat-surat pendukung berupa bukti-bukti pengepakan mesin dari luar negeri, sertifikat serta syarat-syarat uji mesin standar PLN.

14 Juni

Kejaksaan Tinggi Papua masih terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi senilai 41 milyar rupiah di PLN Papua terkait pembelian 10 unit mesin pembangkit tenaga listrik diesel. Menurut Ass Intel Kejati Papua Sendjung Manulang, SH, MH, penyelidikan dugaan korupsi Rp 41 milyar atas proyek listrik masuk desa di lingkungan PT PLN Wilayah Papua sepertinya melibatkan 6 orang, yakni 2 orang pegawai PLN dan 4 orang lainnya adalah pihak lain yang berasal dari perusahaan rekanan PLN sebagai perusahaan pengadaan proyek itu. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa di PLTD Waena dan Sentani kondisi 4 buah generator cukup memprihatinkan. Padahal baru beroperasi 2 tahun. Di PLTD Waena, misalnya dari 3 unit mesin hanya tinggal 1 unit saja yang masih memproduksi 69 persen dari kemampuannya yang sebenarnya, 2 lainnya kemampuannya sudah menurun hingga produktivitasnya tinggal 54 persen. Sementara di Sentani, 1 unit sama sekali tidak bisa beroperasi.

15 Juni

PT PLN Wilayah Papua membantah tuduhan adanya dugaan korupsi di dalam institusinya. Alasannya, dugaan korupsi milyaran rupiah itu menyangkut oknum-oknum pegawai PLN Papua yang diperbantukan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Mereka bekerja di luar struktur Organisasi PLN Papua, terang Manager Bidang SDM dan ADM PLN Wilayah Papua, Drs. Rantau Liling. Lanjut Liling, meski para oknum pegawai PLN itu adalah pegawai PLN Papua, namun terkait Proyek Listrik Pedesaan, pegawai-pegawai yang diperbantukan pada proyek tersebut bertanggung jawab langsung pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Jadi, posisi mereka ketika proyek listrik pedesaan berada di luar struktur Organisasi PLN Wilayah Papua.

21 Juni

Ketua KPUD Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitouw meminta kepada setiap calon dalam Pilkada Kabupaten Jayapura agar melaporkan kekayaan yang dimilikinya kepada

Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak curiga dengan kekayaan yang dimiliki oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih nanti.

G. Simpang-siur OTSUS

31 Maret

Rencana pengembalian Otsus oleh DPRP, menurut Ketua Komisi B DPRP, Abdul Hakim Achmad perlu dipikirkan secara bijak karena dalam Otsus ada berbagai keleluasaan diberikan kepada Papua mulai dari kewenangan, perlindungan HAM, hingga anggaran trilyunan Rupiah untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Jika Otsus dikembalikan maka APBD Papua juga akan mengalami defisit 75 persen.

1 April

Drs. Agustinus Fatem, MT. menilai penggunaan Dana Otsus selama 4 tahun berjalan tidak dirasakan oleh masyarakat Papua. Para bupati dan walikota dinilainya tidak konsisten menggunakan dana Otsus ini. Menurut Fatem pengembalian Otsus ke pusat bukan solusi saat ini. Perlu ada evaluasi apakah ada konsistensi pelaksanaan undang-undang Otsus dan kelengkapan aturannya.

Tanggapan dari Yohanes Rante M.Si (akademisi Universitas Cenderawasih) menilai rencana pengembalian Otsus kepada pemerintah pusat oleh DPRP sebagai sikap yang berlebihan. Otsus adalah salah satu cara mengejar ketertinggalan pembangunan dengan provinsi-provinsi lain. Untuk itu anggaran yang besar dari dana Otsus perlu untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan secara khusus bagi masyarakat Papua.

3 April

Pdt. K. Maniani, S.Th. mengatakan bahwa mengembalikan Otsus harus ada alasan yang jelas agar masyarakat jangan bingung akan masalah ini. Jika DPRP dan MRP tetap nekat mengembalikannya, MRP yang lahir dari Otsus dibubarkan saja.

5 April

Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan mengatakan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun ini sampai ke kampung-kampung akan mengalami keterlambatan dibanding tahun lalu. Pasalnya dana sebesar Rp 54,3 miliar akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim dari Kabupaten Manokwari akan duduk dengan Papua dan untuk membahas program dana Otsus. Pertemuan tersebut akan menetapkan program dalam dana Otsus antara lain 30 persen untuk Pendidikan, 15 persen untuk Kesehatan dan sisanya untuk kegiatan penunjang lain dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

11 April

Dana Otsus tahun 2005 sudah sekitar 90 persen terealisasikan. Namun sampai bulan keempat di tahun 2006 ini belum semua instansi menyerahkan laporannya. Dua instansi itu adalah Badan Bimas Ketahanan Pangan dan BPMD Provinsi Papua. Selain itu ada beberapa instansi yang belum menyampaikan laporan secara keseluruhan antara lain: Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Papua Drs. Waryono, M.Si mengatakan total dana Otsus tahun 2005 Rp 1.775.312.000.000 yang dikelola oleh satuan kerja di Provinsi dan di Kabupaten/Kota Jayapura.

12 April

Ketua Pansus DPRP Otsus Yance Kayame menyatakan Pemerintah pusat tidak boleh membagi dua pengalokasian dana otsus kepada Provinsi IJB mengingat dasar hukum sampai saat ini belum ada, juga keberadaan Propinsi IJB tidak didasarkan pada semangat UU No 21 Tahun 2001 pasal 76 tentang Otonomi Khusus.

12 April

Direktur Eksekutif *Institute for Civil Strengthening* (ICS) Budi Setyanto mengatakan, tanpa mengacu kepada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) penundaan dana otonomi khusus sama saja ilegal dan melanggar hukum. Menurutnya bahwa Pemerintah Propinsi Papua, DPRP dan MRP segera menyikapi persoalan tersebut dan membuat perdasus secepatnya.

17 April

Adanya sejumlah wacana pemekaran wilayah di Propinsi Papua menjadi Propinsi baru disikapi Ketua Komisi A DPRP Yance kayame, pemekaran propinsi baru itu baik mengingat selain pemekaran diatur dalam undang-undang (UU) Otonomi khusus pasal 76 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali pelayanan pemerintah. Yang terpenting adalah proses pemekaran itu harus berdasarkan amanat UU Otsus.

24 April

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Papua H. Suleman L Hamzah mengatakan untuk memajukan usaha kecil dan menengah perlu diberikan modal kepada pelaku usaha sesuai amanat Otsus yakni mengutamakan orang asli Papua. UU No 25 tahun 1992 yang bertujuan memajukan koperasi di kampung-kampung tidak terlaksana. Ia menjelaskan bahwa dana SIUP 05 yang belum sampai ke masyarakat masih tersimpan di Bank Papua. Program tahun lalu sudah terpakai 20 milyar dan sisanya 5 milyar. Maka diperlukan adanya transparansi kepada masyarakat agar sasaran kepada pelaku usaha kecil dan menengah bisa terwujud.

8 Mei

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua, Drs. Tejo Suprpto, mengatakan anggaran tahun ini untuk program pembagian distrik diambil dari dana Otsus. Dana yang diberikan kepada setiap distrik ini separuhnya disubsidi oleh Bank Dunia. Tahun 2006 ini bantuan Bank Dunia terhadap program pengembangan distrik sebanyak 52 distrik.

11 Mei

Sensus Ekonomi mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mengidentifikasi populasi, memperbaharui direktori dan *sampling frame* serta peta penyebaran usaha umumnya di Indonesia khususnya Jayawijaya setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Thomas Ameng, mewakili Plt Bupati Jayawijaya, dalam pembukaan Pelatihan Listing Sensus Ekonomi (SE) 2006 di Hotel Baliem Pilamo.

Dana Otsus Sebesar Rp 651.214.543.400 yang kini dibahas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2006 tidak ada dalam rancangan anggaran satuan kerja (RASK) khususnya yang dikelola Propinsi sebesar 40 % (Rp 1,165 triliun) dari total dana otsus 2006 sebesar Rp 2, 913 triliun. Sedangkan yang dikelola Kabupaten/Kota sebesar 60 % (Rp 1,7 triliun). Hal ini diungkapkan oleh Frans

Maniagasi anggota Pokja Papua. Dana Otsus juga ada yang dialokasikan untuk bidang administrasi umum dan pemerintahan sebesar Rp 6,5 miliar, dana Otsus tidak ada dalam RASK ini perlu dipertanyakan salah satu penipuan rakyat.

17 Mei

Koordinator Program ICS Papua, yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Yusak Elisa Reba mengatakan bahwa saat ini belum tampak mengenai alokasi dana Otsus dalam program prioritas pemerintah. Hal ini diungkapkan pada Diskusi Publik tentang Konsistensi Penyusunan RAPBD Papua tahun 2006 di Hotel Sentani.

18 Mei

Wakil Ketua Komisi B DPRD Drs. Paulus Sumino menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung audit dana Otsus, sehingga jika ada indikasi penyalahgunaan dana maka hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan.

19 Mei

Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung audit penggunaan dana Otsus. Wakil ketua MRP Dra. Hana Hikoyabi mengatakan penggunaan dana Otsus harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur kepada masyarakat Papua. Hana juga menyayangkan bahwa belum adanya perangkat hukum berupa Perdasu/Perdasus sebagai jaban dari UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus. Hal ini membuat posisi pihak MRP juga lemah.

Anggota Komisi D DPRD, Gerald Pahabol, S.Th meminta agar pembagian paket pembangunan di Provinsi Papua dilakukan secara adil dan merata tanpa membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Dana Otsus untuk kota/kabupaten sudah diberikan sebesar 60 persen, namun mengingat masih ada 40 persen dana Otsus yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk paket pembangunan baik fisik maupun non fisik maka perlu dibagi merata kepada semua daerah. Yang selama ini berjalan 1 atau 2 paket diberikan kepada daerah pegunungan, sedangkan 9 atau 10 diberikan kepada Kota Jayapura.

Pejabat Gubernur Propinsi Papua Dr. Sodjuangun Situmorang mengatakan Pemerintah Provinsi mengusulkan tambahan anggaran infrastruktur tahun 2006. Sesuai amanat Otsus Pemprov Anggaran 2006 telah mengusulkan tambahan dan infrastruktur kepada pemerintah pusat sebesar Rp 575 milyar untuk mempercepat pembangunan di Papua. Sedangkan untuk tahun 2007 Pemerintah Provinsi mengusulkan dana Infrastruktur sebesar Rp 2,9 Trilyun.

21 Mei

Penggunaan dana Otsus, baik tingkat pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi hampir 100 persen terealisasi. Kepala Bidang Pengendalian BP3D Provinsi Papua Drs. Waryono, M.Si mengatakan dari total dana Otsus tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.775.312.000.000, dana yang dikelola oleh Provinsi Rp 920 milyar dan yang dikelola oleh Kabupaten Rp. 855 milyar. Dana Otsus yang dikelola oleh Provinsi dan tidak sempat terpakai Rp 19.856.687.549 sedangkan kabupaten yang memiliki dana sisa adalah Kabupaten Mappi Rp 16,5 milyar, Kabupaten Sorong 14,2 milyar serta 6 kabupaten lainnya juga memiliki dana sisa. Dana yang tidak terpakai ini akan dikembalikan ke kas daerah untuk diprogramkan lagi pemakaiannya di tahun anggaran yang baru ini.

25 Mei

Guna menghindari salah sasaran dan penyelewengan dari penggunaan dana Otonomi Khusus sebesar 2 % dari DAU nasional, maka perlu ada perangkat hukum berupa Perdasi/Perdasus yang mengatur penggunaan dana Otsus demikian diusul dan disarankan oleh MRP sebagai mana amanat UU No. 21 Tahun 2001 pasal 36 ayat 3. Maka fraksi PDS DPR Papua Henny Arobaya menyambut positif. Katanya bahwa secara signifikan pendapatan daerah yang terakomodir dari RAPBD Propinsi Papua tahun 2006 cukup menjanjikan, khususnya dana Otsus yang untuk 2006 sebesar Rp 2,9 triliun. Pendapat dari Ketua DPRP John Ibo menegaskan bahwa DPRP mempunyai tekad dan komitmen yang kuat untuk mendorong pembahasan Perdasi/Perdasus terkait penggunaan dana Otsus dalam waktu dekat.

28 Mei

Anggota DPR Papua Pdt. P. Sawen, mengatakan penggunaan dana Otsus untuk empat program pembangunan yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan pembangunan Infrastruktur harus disertai dengan petunjuk teknis (Juknis) selain itu juga perlu didorong perdasi/perdasus sesuai undang-undang Otsus pasal 36 ayat 3 mulai dari pembahasan hingga pengawasan serta pertanggungjawabannya.

9 Juni

Pejabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan hingga saat ini APBD Papua yang sudah disahkan DPRP masih dibahas di Depdagri. Evaluasi APBD itu dilakukan agar disesuaikan dengan program nasional atau Proenas serta kebijakan nasional lainnya diberbagai bidang, baik pembangunan maupun pemerintahan. Selain itu APBD juga dikaji agar tetap taat pada prinsip anggaran sesuai dengan yang diatur dalam pedoman pengelolaan APBD.

Pejabat Gubernur Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi bersama. Tindakan ini merugikan keuangan negara dan ekonomi masyarakat secara luas maka perlu disikapi dengan cara yang luar biasa.

11 Juni

Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli SH, mengatakan bahwa pembagian Otsus jangan hanya berupa program. Menurutnya mengingat letak geografis setiap daerah berbeda, pembagian dana Otsus harus juga disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut. Di Kabupaten Yahukimo dana Otsus disalurkan melalui dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan dinas-dinas lainnya dan sama sekali tidak menolong masyarakat. Jika terus-menerus pemerintah memberikan program tanpa ada pembagian dana langsung maka masyarakat akan tetapi berteriak menuntut hak mereka.

Gaji para ketua RT/RW di lingkungan kelurahan Awiyo, Distrik Abepura yang selama tahun 2006 ini belum terbayarkan disikapi oleh Kepala bagian Tata Pemerintahan Kota Jayapura, Musa Jouwe, SH. M. Si. Ia mengharapkan agar para ketua RT/RW jangan merasa cemas tetapi bersabar karena dalam dana Otsus sudah dianggarkan untuk gaji mereka.

12 Juni

Masyarakat Yahukimo bersyukur karena ada pemekaran yang terjadi di daerah mereka, akhirnya pembangunan bisa mereka rasakan. Ungkapan syukur ini diperuntukkan pertama-tama kepada para misionaris yang sudah dengan susah payah datang mewartakan injil di daerah terpencil seperti Yahukimo. Selain itu ucapan syukur atas pemerintah yang dengan caranya bekerja sama dengan gereja membangun umat menuju kemajuan pembangunan. Bupati Ones Pahabol SE, mendukung dengan program pembangunan yang baik serta mengharapkan kerja sama pemerintah dan gereja terus dikembangkan. Ia berharap agar Otsus membantu kita untuk maju bukan hidup kita tergantung pada Otsus. Kita hidup di daerah sendiri maka perlu perubahan pola pikir, kerja dan pengabdian kita untuk membangun daerah kita saat ini.

Berkaitan dengan Pilkada Jayapura, Lembaga MRP mengirim surat rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Jayapura yang intinya agar proses pemilihan Kepala Daerah terutama rekrutmen kandidat Bupati dan Wakilnya mengacu pada UU No 21/2001 tentang OTSUS. Salah satu point yang ditekankan dalam UU OTSUS adalah calon Kepala Daerah dan Wakilnya harus orang asli Papua, tegas ketua II MRP Ny. Hanna Hikoyabi.

18 Juni

Pendapat dari Komisi B DPRD Paulus Sumino bahwa lemahnya kemampuan dana Otsus dalam mendorong sektor ekonomi ini disebabkan karena selama ini dana alokasi umum (DAU) untuk Otsus Papua yang jumlahnya 2 persen dari DAU nasional itu lebih banyak terserap pada infrastruktur yakni sekitar 20 hingga 30 persen. Ia meminta agar Eksekutif (Pemprov) lebih bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan dana Otsus khususnya yang bersumber dari pasal 34 Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mengatakan bahwa pembiayaan dari APBN setiap tahun berdasarkan program yang dibahas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

21 Juni

Ketua DPRD Drs. John Ibo menegaskan bahwa penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya sebesar 2 % dari dana alokasi Umum (DAU) Nasional setiap tahunnya ini sudah diaudit penggunaannya oleh BPK dan Bawasda Propinsi Papua sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran atau penggunaan keuangan negara.

28 Juni

7 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah RI menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintahan Provinsi Papua dan Lembaga lain untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Ketua Tim DPD RI, Edwin Kawilarang mengatakan, kunjungan mereka ke Jayapura dalam rangka mengadakan pertemuan dengan berbagai komponen Pemerintahan, Adat, dan Agama. Dalam pertemuan ini, DPD RI hendak mendengar berbagai masalah yang masih mengganjal dalam pelaksanaan pembangunan, seperti molornya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih, pelaksanaan OTSUS, pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, dan situasi keamanan secara keseluruhan. Seluruh aspirasi yang diterima akan dibahas di DPD RI di Jakarta dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat.

H. Keterpurukan Pelayanan Kesehatan

31 Maret

Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua TG. Butarbutar, M.Kes mengatakan bahwa hingga saat ini keseriusan jumlah kepala Daerah masing-masing Kabupaten/kota mencegah HIV/AIDS masih kurang.

2 April

Kepala Kesehatan Kabupaten Boven Digoel, dr Titus Tambaib, M.Kes mengatakan sasaran pertama sosialisasi tersebut adalah para petugas kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas se-wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Drs Danang Jaya menyatakan bahwa Rencana Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menggalang kesadaran masyarakat akan penting Program KB (Keluarga Berencana) yang merupakan salah satu Program Pemerintah dalam menekan laju angka pertumbuhan penduduk mendapat dukungan dari Komisi E DPRD. Tujuan KB adalah selain menekan laju angka pertumbuhan penduduk, juga untuk mengatur angka pertumbuhan penduduk yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3 April

Ketua DPRD Kota Jayapura Theopilus Bonay menjelaskan bahwa DPRD Kota sedang merancang draft Peraturan Daerah (Perda) tentang HIV/AIDS dan IMS diharapkan jadi produk hukum bagi penanggulangan HIV/AIDS. Meski begitu hasil kajian pembahasannya belum final. Sebelum dibahas dalam sidang non APBD 2006 pada Juli mendatang, terlebih dahulu akan disempurnakan maka akan dilakukan studi banding ke beberapa daerah yang memberlakukan hal itu: Surabaya, Tangerang dan daerah lainnya.

Ketua Komisi E DPRD, Zakarias Yappo meminta agar Provinsi Papua khususnya Dinas Kesehatan (DINKES) Provinsi Papua serius memperhatikan sistem dan pola pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedalaman Papua. Hal itu dikatakannya terkait dengan maraknya wabah penyakit seperti Kolera, disentri, gizi buruk, busung lapar, muntaber serta beberapa penyakit lain yang menyerang warga masyarakat di sejumlah daerah di Papua. Di satu sisi pemerintah harus mengakui bahwa merebaknya penyakit ini dan memakan korban merupakan kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu kepada masyarakat khususnya masyarakat yang hidup di pedalaman.

3 April

Ibu negara akan berdialog dengan para ODHA akan dilakukan Rabu pagi sebelum panen raya dilakukan dipusatkan di Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat Yasanto. Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional dr. M. Nasser mengungkapkan rencana pertemuan dengan para ODHA dan LSM Peduli HIV/AIDS di Merauke merupakan simbol dan bukti perhatian negara terhadap mereka yang terstigma karena HIV/AIDS selain itu karena Epidemii HIV/AIDS di Papua berlansung sangat progresif dan sudah masuk ke dalam kategori General Population Epidemii. Artinya bukan bagi mereka yang bekerja tempat-tempat berisiko tinggi tapi juga bagi ibu rumah tangga dan anak-anak.

4 April

Di Wamena para penderita Muntaber mencapai 85 orang. Bupati Nikolas Jigibalom minta agar masyarakat waspada terhadap wabah muntaber ini. Dari data kampung Holima (distrik Wamena), kampung Holima (distrik Hubikosy). Data RSUD Wamena dari

16 Maret-01 April mencapai 85 orang; 32 balita, 15 remaja dan 38 orang dewasa. Bupati Nikolas juga mengharapkan agar semua pihak bisa bekerja sama mengatasi masalah kesehatan ini. Biaya pengobatan akan dibebaskan dan akan menjadi tanggungan pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jayawijaya; Maskur Adam

5 April

Direktur RSUD Wamena Dr. Viviana mengatakan RSUD Wamena siap siang malam (1x24 jam) melayani pasien Muntaber. Kebanyakan anak-anak balita dan sebagian orang dewasa. Anak-anak balita semuanya bisa rawat inap dan orang dewasa rawat jalan. Hal pokok yang menyebabkan muntaber adalah pola hidup yang tidak memperhatikan kebersihan makanan dan minuman.

Kepala BKKBN Provinsi Papua Josua Singgamui mengatakan bahwa keberadaan posyandu di masing-masing masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting. Dikatakan pihaknya akan memberikan perhatian terhadap pengembangan Posyandu di seluruh daerah.

Ibu Negara, Ani Susilo Bambang Yudhoyono minta agar stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS sudah saatnya dihilangkan karena adalah saudara dan keluarga kita.

8 April

Kasus Penyebaran HIV/AIDS di Nabire terus meningkat bahkan telah menduduki urutan ke 4 untuk Propinsi Papua. Untuk urutan satu: Merauke, kedua Timika lalu Jayapura. Hal tersebut sesuai data dari komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Nabire. Kata Dokter muda Anthon Mote bahwa hingga saat telah tercatat penderita AIDS 205 di Nabire angka ini tahun 1998 sampai November 2005.

10 April

Sungguh memprihatinkan meski dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS 15 PSK itu namun mereka tetap menjalankan profesinya sehari-hari melayani setiap laki-laki yang datang dilokasi. Tentang 15 PSK yang positif di lokasi Yobar terungkap dalam rapat koordinasi KPA Kabupaten Merauke di Yasanto.

11 April

Korban muntaber di Wamena terus bertambah. Karena fasilitas rumah sakit terbatas dan pasien bertambah banyak, maka sebagian pasien tidur di lantai, di kursi panjang yang ada di UGD. Direktur RSUD Wamena Viviana mengemukakan bahwa sampai Selasa 11 April Jumlah pasien muntaber 177 orang, parah penderita bergantian, selalu bergantian. Kami siap melayani hanya saja terbentur masalah Obat dan tempat rawat inap.

13 April

Sosialisasi Perda No 20 tahun 2003 di Lokasi Tanjung Elmo tentang pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sudah beberapa kali digelar. Hal ini dilakukan oleh petugas dari KPAD Kabupaten Jayapura Untuk memantapkan Perdanya. Kegiatan yang digelar di Wisma Rilex mensosialisasikan wajib untuk menggunakan Kondom. Secara tegas perda tersebut meminta untuk selain sanksi tertulis dan larangan berpraktek selama 5 hari bagi PSK dan Mucikari yang kedapatan melanggar aturan Perda. Bila

sangsi itu tidak diindahkan dan diulangi lagi maka para PSK dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak 5 juta.

16 April

Penyakit Campak yang setiap tahun menyerang anak-anak di Kabupaten Asmat bahkan selalu membawa korban jiwa. Membuat dinas perlu melakukan penanganan khusus terhadap virus yang dapat tertular ke orang lain. Untuk penanganan kasus ini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan MSF, sebuah LSM dari Swedia yang punya perhatian terhadap penyakit-penyakit menular. Kepala Dinas Kabupaten Asmat, Tohap Capah mengatakan bahwa ada 4 distrik yang menjadi kerjasama: Agats, Sawa Erma, Atsy dan Akat. Keempat distrik tersebut yang selama menjadi Endemik Virus campak yang selalu menyerang balita dan anak-anak setiap tahun.

17 April

Di Wamena ratusan ternak babi mati akibat terserang virus Hoc Cholera. Daerah yang mendapat penyebaran virus mematikan ini adalah Distrik Tiom, Malagaineri, Balingga, Kuyawage, Tiomneri. Kepala Kantor Klinik Hewan Dinas peternakan kabupaten Jayawijaya, drh.l. Made Putra, mengatakan bahwa firus ini sangat ganas dan kalau menyerang ternak babi akan mati seketika dan virus ini akan menular pada hewan babi sehat lain.

18 April

Bupati Nicolas Jigibalom mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Jayawijaya agar mulai menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan sehat agar terhindar dari penyakit muntaber. Menurutnya cara hidup yang tidak sehat dengan pola makan yang tidak teratur dan sehat menimbulkan bibit penyakit dalam tubuh kita. Lingkungan tempat kita tinggal (honai) harus selalu dibersihkan, babi dikandangan dengan cara yang baik agar terhindar dari penyakit yang mematikan ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor memastikan wabah Diare yang menyerang Kabupaten Biak Numfor dalam 3 minggu terakhir, disebabkan oleh bakteri Ecoli Patogen yang terkandung dalam air. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di laboratorium terhadap 5 sampel tinja pasien diare. Dari 5 sampel 3 sampel dinyatakan positif bakteri Ecoli Patogen. Kepala Subdin pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Dinkes Biak Numfor, A.M.Ridway Halim,S.Sos membenarkan hal ini setelah 5 sampel tinja pasien diare diperiksa di Laboratorium Jayapura. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat 383 kasus Diare, 7 orang meninggal dan terdapat tambahan 10 pasien baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor.

KLB Muntaber di Wamena menyebar paling banyak di Distrik Kurulu. Selain Distrik Kurulu dan Musatfak, KLB juga menyebar ke Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo tepat di Kelurahan Obolma, Desa Anjelma, Desa Serima, Desa Wanem, Desa Ibirama, Desa Hiundes dan Desa Userem. Korban yang meninggal dunia berjumlah 27 orang, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Korban meninggal tidak serempak, tetapi selang beberapa hari ada yang meninggal dengan gejala yang sama. Kepala Dinas Kesehatan Yahukimo (Yakobus Mariu) memberikan keterangan bahwa di Kabupaten Yahukimo hari ini ada tim dokter turun ke lapangan, untuk mengobati para pasien yang jumlahnya sudah 200 orang. Tim dokter ini datang dari Jakarta bersama satu perawat dari Provinsi Papua dan seorang lagi dari Kabupaten Yahukimo.

Kepala Dinas Propinsi Papua, dr. Tigor Silaban, menjelaskan bentuk perhatian pada kesehatan dengan mengalokasikan 30 persen dana bidang kesehatan untuk pengadaan obat-obatan bagi masyarakat kecil. Pengadaan Obat gratis bagi masyarakat agar masyarakat ke puskesmas tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Tigor mengharapkan kerjasama dengan Kabupaten dan Kota bisa lebih baik lagi, bila obatnya sudah didrop maka perlu juga petugas yang membantu untuk melayani.

19 April

DPRD desak pemerintah Provinsi supaya memberikan perhatian serius kepada para penderita muntaber di Wamena yang sudah menelan korban jiwa itu. Salah satu anggota Komisi E (membidangi kesra) DPRD Manuel Wetapo, SE yang turun langsung ke lapangan mengatakan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah dan provinsi akan kejadian luar biasa di Wamena ini. Menurutnya kurangnya fasilitas menjadi hal urgen bagi RSUD Wamena. Perhatian dari para medis juga belum maksimal. Pasien harus tidur di lantai dengan memegang botol infus. Menurutnya ini sangat memprihatinkan. Sementara itu mantri Obet Dabi mengaku dengan ada sekitar 422 penderita mutaber rata-rata dibawah ke UGD maupun RSUD Wamena rata-rata sudah dalam keadaan lemas karena kekurangan cairan.

23 April

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf mengunjungi para penderita Muntaber di RSUD Wamena. Jumlah pasien berjumlah sekitar 500 orang.

24 April

Data dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena menunjukkan jumlah orang yang meninggal akibat wabah muntaber di Wamena 178 orang.

26 April

Terdakwa Kasus penyalahgunaan Dana Peningkatan Upaya Kesehatan (PUK) yang dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) divonis bebas. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena menilai putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa Hamzah dan Christina Tarupono berdasarkan salah satu unsur dalam dakwaan primer pasal 2 UU No.31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20/2001 yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau koperasi sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti dalam persidangan.

26 April

Jumlah orang yang meninggal akibat wabah muntaber di Wamena 178 orang. Jumlah penderita juga mengalami peningkatan 2.536 orang. Sebagian besar dirawat di RSUD Wamena. Jumlah pasien rawat jalan 387 orang dan rawat inap 314 orang. Yang meninggal di RSUD Wamena 10 orang. Wabah ini menyebar secara merata di 9 wilayah: Kurulu, Hom-Hom, Musatfak, Wamena, Pugima, Assolokobal, Bolakme, Asologaima dan Hubikosi. Dari 9 wilayah, distrik Kurulu paling banyak penderitanya yaitu 1.930 orang dan yang meninggal dunia 103 orang. Sedangkan paling sedikit Assolokobal yaitu , 47 orang penderita dan yang meninggal dunia 2 orang.

27 April

Pemberdayaan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) saat ini telah memiliki wadah tersendiri dengan nama jaringan ODHA kota jayapura. Ketua Jaringan Elianus M mengatakan bahwa salah satu dasar utama dibentuk jaringan tersebut adalah supaya para ODHA

tidak perlu tergantung secara mental dan perilaku, materiil dan obat-obatan kepada pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada. Juga pembentukan jaringan ini supaya tidak terkotak-kotak dan menjadi satu kekuatan untuk turut membantu dalam penanggulangan virus tersebut.

Wabah Muntaber menimpa Kabupaten Jayawijaya menjadi Kejadian luar biasa (KLB) sejak 16 maret sampai dengan tanggal 25 April sudah 178 orang yang meninggal dunia, selain itu jumlah penderita 2.536 orang yang menjalani rawan inap di RSUD diungkapkan oleh dr Berry Wopari kepada Staf Menkes Dwijo Suseno yang didampingi plt. Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalon

28 April

Di Timika kasus HIV/AIDS melambung tinggi dan membuat panik semua pihak termasuk pihak gereja. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa sampai saat ini 1.020 kasus. Data diperoleh dari Departemen Health Malaria Control, Kwamki Lama oktober 2005. Salah satu staf Komisi Penanggulangan AIDS Mimika, Ubra menjelaskan bahwa setiap 5 pasien yang memeriksakan darah terdapat 3-4 orang yang positif HIV/AIDS.

Pengalokasian dana untuk kesehatan dalam RAPBD tahun 2006 terkesan mengabaikan hak-hak masyarakat. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif ICS Budi Setiyanto *Institute for Civil Society Strengthening* (ICS) atau lembaga penguatan Masyarakat Sipil Papua. Bila sesuai dengan standar WHO dari total RAPBD 4.015,57 triliun idealnya sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp.602,5 miliar (15 %) tapi kenyataannya hanya Rp.196,29 miliar atau hanya 4,8 persen saja.

Jumlah penderita penyakit HIV/AIDS di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat hingga Desember 2005 mencapai 2.163 orang dengan perincian 1.202 pengidap HIV dan 961 penderita AIDS. Namun diperkirakan sudah mencapai 40.000 kasus.

30 April

Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS daerah KPAD Kota Jayapura H. Sudjarwo Penyakit HIV/AIDS selalu bertambah dan diperkirakan sekitar 2 ribu warga kota telah terinfeksi virus yang belum ada obatnya. Hal ini disampaikan usai membuka acara pelatihan pengenalan HIV/AIDS dan ketrampilan mengelola, melaksanakan program CO bagi kelompok masyarakat di Hotel Permata.

31 April

Kesehatan dan pendidikan adalah dua bidang kehidupan manusia yang harus mendapat penanganan serius. Kabupaten Asmat terkenal dengan penyakit campak dan gizi buruk. Di bidang pendidikan Asmat hanya membangun aspek fisiknya saja tetapi aspek mutu tidak diperhatikan. Dalam tahun 2006 ada 8 gedung baru dibangun dan puluhan lainnya direhab. Ketua DPRD Kabupaten Asmat Thomas Eppe Safampo menyoroti penanganan dua bidang kehidupan masyarakat agar tetap menjadi prioritas pemerintah bukan hanya dalam pengadaan fasilitas tetapi juga mutu agar ditingkatkan.

1 Mei

Direktur RSUD Wamena dr.Viviana Maharani menerima bantuan makanan dan obat-obatan dari Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI) Jakarta. YTBI adalah Yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dibawa naungan Gereja Kristen Injili (GKI). YTBI didirikan baru setahun yang lalu. Untuk diketahui bahwa jumlah penderita Muntaber di

Wamena bertambah 848 orang. Jumlah korban yang meninggal 12 orang. Total seluruh korban dari penyakit ini 190 orang.

2 Mei

Sampai dengan minggu ke 19 tahun 2006 Di Biak sejak Januari Dinas Kesehatan menemukan 38 kasus Campak. Kepala Subdin Pencegahan dan pemberantasan Penyakit menular Dinkes Biak Numfor, A.M Ridway Halim Jumlah pasien yang terjangkit virus campak ini paling banyak usia anak-anak. Kasus Campak terdapat di Distrik Biak Timur, Puskesmas Marau. Selain memberikan bantuan berupa tindakan medis kepada para pasien, diadakan juga pendataan kepada anak-anak untuk memberikan vaksinasi campak.

4 Mei

Wakil Ketua Komisi E DPRD Danang Jaya menegaskan KLB Muntaber di Wamena perlu penanganan serius dengan menggunakan semua kemampuan yang ada, sehingga masalah ini tidak berkepanjangan. Ia juga mengatakan bahwa fakta juga bisa menghambat pemerintah seperti halangan geografis atau aparatur pelaksana di lapangan. Pihaknya membantah bahwa faktor geografis menjadi hambatan sekaligus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

5 Mei

Di Biak puluhan anak terserang Diare. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Drs. Sefnath Korwa, M.Si.membenarkan hal ini dan ada sekitar 60-an pasien yang sedang dirawat di RSUD Biak Numfor. Di RS TNI angkatan laut Biak jumlah pasien diare 25 orang. Sebagian besar pasien berusia 8 bulan sampai 15 tahun.

Di Kabupaten Jayawijaya pemerintah Provinsi memberikan bantuan sebesar 5 milyar, untuk biaya operasional RSUD Wamena. Anggaran ini akan digabung dengan anggaran Pemerintah Jayawijaya yang jumlahnya mencapai 10 milyar. Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Basaleng mengatakan ini wujud perhatian dari pemerintah provinsi termasuk persoalan Muntaber, membayar utang kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT.Kimia Farma, pembelian alat laboratorium.

Ketua kelompok kerja (Pokja) Papua Komisi AIDS Nasional (KPAN) dr. Nafsiah Mboi, MPH. mengungkapkan bahwa untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Papua memerlukan kepemimpinan yang kuat. Jika tidak ada pemimpin yang peduli dan cinta akan rakyatnya diyakini akan menambah daftar panjang orang yang terserang virus mematikan ini. Di Papua data terakhir per 31 maret 2006 jumlah orang terkena virus HIV/AIDS mencapai 2.199 kasus. Jumlah ini berdasarkan hasil tes darah sebagian pasien oleh petugas, belum termasuk mereka yang terinfeksi tetapi belum dites darahnya. Diperkirakan jumlah kasus HIV/AIDS di Papua mencapai 12.000 kasus. Maka kira-kira ada 10.000 orang yang terinfeksi namun belum dideteksi oleh petugas.

7 Mei

Jumlah pasien diare di Kabupaten Biak Numfor mencapai 132 kasus. Sedangkan korban yang meninggal dunia 3 orang yang berasal dari Distrik Biak Kota dan Samofa. Menurut laporan terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.

8 Mei

Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Merauke sejak januari hingga akhir April 2006 jumlah warga yang terserang diare sebanyak 1.060 orang. Satu diantaranya

meninggal dunia. Jumlah tersebut belum termasuk yang berobat di puskesmas-puskesmas dan Rumah Sakit Pengharapan Kelapa Lima Merauke. Demikian disampaikan oleh Direktur RSUD Merauke dr Petrus Tjia

Korban diare di Biak Numfor terus bertambah hingga mencapai 153 orang. Menurut kepala Subdin pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Dinkes Biak Numfor A.M. Ridway Halim data tersebut belum termasuk pasien yang dirawat di RS TNI AL dan RS TNI AU Lanud Manuhua Biak dan sejumlah penderita yang tidak dibawa ke rumah sakit. Menurut Dr. Isak Direktur RSUD Biak Numfor Para pasien ini merupakan diare ringan, belum ada yang terkena diare berat. Rata-rata pasien yang masuk rumah sakit 3 sampai 4 hari sudah bisa pulang.

Wabah Diare yang menyerang Kabupaten Merauke sejak awal Januari 2006 hingga Mei ini diperkirakan mencapai 1.060 orang. Namun karena pihak medis cepat menanganinya sejak awal maka semuanya sembuh. Keadaan ini belum bisa dikategorikan Kejadian Luar Biasa karena diare yang terjadi di Merauke sudah endemik yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Kabupaten Merauke drg. Joseph Rinta, M. Kes.

9 Mei

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan Departemen Kesehatan RI Jakarta, Dr.I. Nyoman Kandun bersama rombongan melihat dari dekat musibah muntaber di Wamena. Dalam kesempatan ini mereka mengunjungi RSUD Wamena, Puskesmas Hom-Hom, Puskesmas Kurulu. I Nyoman merasa prihatin dengan keadaan pasien muntaber di Wamena. Ia mengharapkan agar perlu kerjasama yang lebih intensif lagi dari pihak medis di RSUD Wamena dalam menangani kasus muntaber.

Di Hotel Sentani Indah diadakan pertemuan regional untuk akselerasi program penanggulangan HIV/AIDS di tanah Papua. Dalam kesempatan ini Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) atas nama Aleks (52 thn) meminta pemerintah, agar lebih serius dalam menangani masalah HIV/AIDS. Ia mengharapkan agar pemerintah jangan hanya berjanji saja tetapi merealisasikan janji itu dengan lebih serius lagi. Selama ini ODHA mengkonsumsi obat ARV selama 1x24 jam untuk menambah daya tahan tubuh. Para ODHA mengharapkan agar dengan pertemuan seperti ini ada kebijakan baru dalam menangani HIV/AIDS di Tanah Papua agar bisa meredam menurunnya angka kematian akibat penyakit menular mematikan ini.

Di Puncak Jaya sampai tahun 2006 tercatat 4 pengidap HIV/AIDS meninggal dunia. Hal ini diungkapkan dr. Edwin H. Panjaitan dalam pertemuan regional penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua di Hotel Sentani Indah. Dari 4 orang yang meninggal dunia, satu orang kampung, satu orang mahasiswa dan dua orang pegawai negeri.

Di Taman Imbi 3 orang melakukan demo seorang ibu dengan 2 orang anaknya dengan isu tentang HIV/AIDS. Ibu numberi dengan dua orang anaknya masing-masing ; Samuel Waromi dan Elya Waromi. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk keprihatinan akan HIV/AIDS di tanah papua.

Dinas Kesehatan kabupaten Biak Numfor masih terus melakukan penelitian untuk mengungkapkan penyebab wabah diare yang sedang menyerang warga Kabupaten Biak Nufor. Kepala Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes

Niak Numfor A.M. Ridway mengatakan bahwa sampai saat ini penyebab utama penyakit diare yang menyerang masyarakat belum diketahui.

Data hingga hari ini jumlah pasien berjumlah 217 orang. Faktor penyebab antara lain air yang dikonsumsi warga mengandung bakteri Ecoli dalam sampel air yang cukup tinggi yaitu 1100 mg/desiliter. Ukuran standar untuk air minum kandungan bakteri ecoli 0. Untuk pencegahan telah diberikan bantuan 15 kg kaporit ke PDAM untuk mengurangi bakteri ecoli pada sumber air PDAM.

11 Mei

Di Lingkungan Pemkab Jayapura ada empat Pegawai Negeri Sipil yang positif HIV/AIDS. Bupati Habel Melkias Suwae S.Sos, MM mengingatkan agar setiap orang apapun statusnya supaya bisa menjaga diri dengan hidup sehat bebas dari penyakit mematikan ini.

14 Mei

Kasus HIV/AIDS di Propinsi Papua dari data terakhir pada 31 Maret 2006; 2199 kasus dengan rincian 1226 HIV dan 973 AIDS. 89 % penularan kasus ini melalui hubungan seks, hal ini diungkapkan dalam temu Regional yang di hadiri oleh seluruh Bupati di 29 Kabupaten kota Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Menkokesra Aburizal Bakrie dalam temu regional ini mengatakan penyebaran HIV/AIDS terbesar adalah Jakarta dan setelah itu Papua yang mana terdapat di 19 Kabupaten telah terinfeksi sehingga perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk melibatkan *stakeholder* yang di masyarakat.

RSUD Biak Numfor sampai saat ini masih mengalami kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter spesialis. Direktur RSUD Biak Numfor Dr Isak Pairuna mengatakan tenaga dokter spesialis, khususnya spesialis Penyakit dalam dan THT

15 Mei

Perwakilan UNICEF Dr. Ratih memberikan bantuan kepada warga yang terserang wabah Diare di Wamena berupa alat masak dan obat-obatan kepada Pemkab Jayawijaya yang diterima oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda, Drs. Bartol Paragaye. Katanya bahwa bantuan ini adalah bantuan kemanusiaan.

Korban yang meninggal dunia akibat wabah Diare di Biak Numfor berjumlah 7 orang. Umumnya pasien mengalami dehidrasi dan terlambat diberi pertolongan. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat 326 orang pasien Diare dirawat di 3 rumah sakit yaitu RSUD Biak Numfor, RS TNI Angkatan Laut dan RS TNI Angkatan Udara Lanud Manuhua Biak.

16 Mei

Pasien diare di Merauke terus bertambah total korban diare terus bertambah mencapai dari 18 minggu mulai januari hingga April total korban diare mencapai 1060 orang data RSUD Merauke. Maka selama minggu terakhir (Minggu ke 19) jumlah pasien mencapai 114 pasien. Total pasien diare selama minggu ke 19 ini sebanyak 114 orang ungap Direktur RSUD Merauke dr Petrus Tjia.

18 Mei

Terbentuknya jaringan ODHA di Kota Jayapura merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang telah terinfeksi virus HIV/AIDS dalam rangka upaya penganggulangan HIV/AIDS di kota Jayapura. Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas

Ketua Harian KPAD Propinsi Papua Drs P.S Ukung menanggapi terbentuknya jaringan ODHA.

Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor kepala Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Biak Numfor A.M Ridway memastikan wabah diare yang menyerang Kabupaten Biak Numfor dalam 3 minggu terakhir disebabkan oleh Bakteri Ecoly Patogen yang terkandung dalam air. Dari hasil labolatorium 5 sampel tinja pasien diare dikirim ke Jayapura menurut tiga sampel mengandung Baktery Ecoly Patogen.

19 Mei

Tercatat hingga tahun 2006 di Kabupaten Keerom teridentifikasi 7 orang positif terinfeksi virus HIV/AIDS. "Dari jumlah tersebut 6 di antaranya adalah wanita dan 1 laki-laki," ungkap kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom dr Johan Lopulalang saat memaparkan Hasil Survey HIV dan siphilis yang dipaparkan di Aula Bapeda Kabupaten Keerom.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Drs. Sefnath Korwa mengawatirkan yang dikeluarkan 30 April 2006 terdapat penambahan 16 kasus HIV/AIDS sehingga total kasus HIV/AIDS di Biak mencapai 165 kasus. Dari jumlah itu, 41 diantaranya ibu rumah tangga, 23 pengangguran dan 21 pekerja seks komersial. Faktor utama yang mengakibatkan virus itu menular kemana-mana adalah hubungan seks. Data menunjukkan 98 persen diakibatkan karena hubungan seks.

22 Mei

Kelompok peduli kemanusiaan melakukan aksi bagi-bagi bunga di lingkaran Abepura dalam rangka peduli pada HIV/AIDS.

Pemerintah Provinsi telah membuka pelayanan lewat *Voluntary Counselling and Test* (VCT) HIV/AIDS di RSUD Abepura. Hal ini bermaksud membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan test guna mengidentifikasi apakah seseorang itu telah terinfeksi HIV/AIDS. VCT HIV/AIDS di RSUD Abepura dioperasikan bulan Februari 2005. Data Maret 2005 jumlah kasus yang ditangani 150 kasus. Sejak Februari 2005 jumlah pasien yang hasilnya positif HIV berjumlah 23 orang dan negatif 35 orang. Pada bulan Maret 2006 pasien positif HIV 10 orang dan negatif 15 orang.

Wakil Walikota Jayapura, H Sudjarwo yang juga ketua harian Komisi penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Jayapura mengatakan rencana peraturan daerah (Raperda) mengenai kasus HIV/AIDS segera diajukan ke dewan untuk dibahas dalam sidang non APBD. Raperda HIV/AIDS telah dibuat bersama-sama dengan pihak Legislatif dan siap diajukan ke sidang dewan

23 Mei

Di Timika kasus HIV/AIDS melambung tinggi dan membuat panik semua pihak termasuk pihak gereja. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa sampai saat ini 1.020 kasus. Data diperoleh dari Departemen Health Malaria Control, Kwamki Lama Oktober 2005. Salah satu staf Komisi Penanggulangan AIDS Mimika, Ubra menjelaskan bahwa setiap 5 pasien yang memeriksakan darah terdapat 3-4 orang yang positif HIV/AIDS.

25 Mei

Perkembangan Kasus HIV/AIDS di Propinsi Papua sudah sangat mengkuatirkan maka KPAD Propinsi Papua maupun komponen masyarakat segera membenah diri dan meninjau kembali strategi dan Program penanggulangan HIV/AIDS. Mengingat rerata kumulatif secara nasional Propinsi Papua paling tinggi, 17,08 kali angka nasional. Yang lebih parah lagi bahwa penyakit ini sudah masuk dalam keluarga, dengan prosentase 98 persen adalah hubungan seks, diungkapkan oleh Anggota Komis E dr John Manangsang.

Dari data yang diperoleh dinas kesehatan Asmat menyebutkan bahwa dari 2.346 anak dan balita yang berhasil didata bahwa 129 balita diantaranya mengalami gizi buruk dimana 5,498 persen dari balita dan anak mengalami gizi buruk. Gizi buruk ini hampir ditemukan diseluruh distrik diantaranya :

DISTRİK	gizi buruk	gizi kurang	Baik	Jumlah
Agats	54	114	332	500
Sawa Erma	30	99	271	400
Atsi	11	203	336	550
P. Kasuari	17	62	320	399
Suator	7	20	220	247
Fayit	10	60	180	250
Total	129	558	1.659	2.346

26 Mei

Tim Medis Posko Penanggulangan wabah muntaber KLB Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya melaporkan jumlah penderita wabah muntaber semakin menurun. Plt. Kasubdin Pemberantasan Penyakit Malaria (P2M) Sukmasyah Cakra menjelaskan bahwa sampai sejauh ini Wabah muntaber normal karena wabah diare sudah tidak lagi. bantuan dari berbagai pihak dalam menangani masalah muntaber. Masyarakat selalu harus diberi penyadaran akan pentingnya hidup sehat dengan pola hidup sehat.

Ketua Panitia Simposium Kesehatan kanker payudara dan leher rahim, Ona Ayomi, mengatakan angka kematian ibu (AKI) 307 per 100 ribu kelahiran hidup atau dengan kata lain 20 ribu perempuan meninggal pertahun yang terkait dengan kehamilan. Demikian ungkapannya saat memberikan sambutan Pada acara Simposium Kesehatan kanker Payudara dan leher rahim di Hotel Relat Indah Jayapura.

Angka kematian ibu dan anak di Papua dari survei terakhir disebutkan bahwa jumlah kematian mencapai 750-1313 orang per 100.000 kelahiran yang hidup. Kasubdin Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Marthen Sakrim dalam pertemuan review 6 bulan kemajuan pelaksanaan distrik team problem solving, di Aula Hotel Relat Indah membenarkan hal ini. Menurutnya faktor penyebab kematian ibu dan anak cukup tinggi adalah (1) kurangnya pemerataan pelayanan kesehatan (2) keadaan geografis yang tidak seimbang. Banyak masyarakat tinggal di daerah terpencil jauh dari pusat pelayanan kesehatan (3) tenaga medis sangat terbatas (4) kualitas pelayanan masih sangat rendah.

27 Mei

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS pemerintah kota mengalokasikan dana sebesar Rp 820 juta yakni 600 juta dari Pemda Kota dan 220 juta dari Dinas Kesehatan kota Jayapura, Diungkapkan oleh Ketua Harian KPAD Kota Jayapura H, Sudjarwo.

28 Mei

Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan HIV/AIDS dan IMS sudah diserahkan KPAD Propinsi Papua melalui dinas Kesehatan Propinsi Papua kepada DPRD sejak 2005 namun sampai saat ini belum disahkan. Untuk memproteksi dibutuhkan sebuah hukum berupa Perda (Peraturan Daerah) dikatakan oleh plt. Ketua Harian KPAD Propinsi Papua Ps Ukung.

Di Asmat, menurut Kepala Dinas Kesehatan, dr. Tohap Capah bukan hanya gizi buruk yang melanda daerah ini saja, tetapi juga tingginya angka kematian ibu dan anak. Faktor penyebabnya adalah (1) budaya. Setiap ibu yang melahirkan bukan melahirkan di rumah tetapi di hutan, di dalam bevak-bevak. (2) ketika melahirkan sang suami tidak boleh hadir mendampingi isteri. (3) menikah dalam usia yang masih sangat muda. (4) pengaturan jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak berikutnya sangat dekat. (5) ibu yang sedang hamil kekurangan gizi (6) masih rendahnya kesadaran kaum ibu untuk memeriksakan kehamilan ke puskesmas.

29 Mei

Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kota Jayapura, H. Sudjarwo, BE, mengatakan kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura bertambah menjadi 2 ribu orang. Hal ini dikatakannya dalam membuka acara pelatihan pengenalan HIV/AIDS dan keterampilan mengelola, melaksanakan program CO bagi kelompok masyarakat di Hotel Permata. Ia menerangkan juga bahwa pada umumnya kelompok yang terinfeksi HIV/AIDS adalah kelompok usia produktif. Kelompok ini punya pengaruh yang besar dalam kelanjutan kehidupan di Papua. Jika kelompok ini punah maka akan kehilangan mata rantai kelompok produktif dalam mengemban tugas membangun bangsa ini.

2 Juni

Dua bulan terakhir ini 11 penderita HIV/AIDS di Biak meninggal dunia. Penderita meninggal dengan usia rata-rata 20-29 tahun. Dari data HIV/AIDS Kabupaten Biak Numfor per 31 Mei 2006 jumlah total penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia 76 orang. Sementara total kasus HIV/AIDS mencapai 178 kasus.

5 Juni

Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua menggelar kegiatan pelatihan pendidikan sebaya tentang kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Dalam kegiatan pelatihan itu Direktur YPKM Papua, Drs. Tahi G Butar Butar M Kes, mengungkapkan bahwa kalangan remaja sangat rawan akan penyebaran HIV/AIDS. Maka itu perlu perbaikan perlakuan hidup yang sehat jasmani dan rohani. Bupati Habel Suwae, juga mengharapkan agar anak-anak remaja yang adalah penerus pembangunan dapat menjaga perilaku hidup yang bermoral, beriman agar keharmonisan hidup terus dijaga.

7 Juni

Di Papua kasus HIV/AIDS bagi dunia pelajar mencapai 194 kasus, 82 positif AIDS dan 112 positif HIV, 60 persen putra daerah, 40 persen pendatang. Rata-rata pelajar berusia antara 15-19 tahun. Faktor pendukung adalah seks bebas, sering nonton film-film porno, makanan bergizi yang memicu pertumbuhan.

17 Juni

Direktur Aksi Stop AIDS (ASA) dr. Gunawan Ingkokusumo minta agar semua komponen masyarakat dapat memahami penyebab penularan-penularan penyakit infeksi menular

seksual (IMS). HIV/AIDS banyak disebabkan melalui hubungan seks khususnya di Papua. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Yayasan Harapan Ibu (YHI) Drs. David Wambrauw, semua komponen mulai dari masyarakat hingga pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan maupun pejabat lainnya harus memahami secara baik tentang HIV/AIDS atau IMS karena bila hal ini dibiarkan kekuatiran akan bertambah.

20 Juni

Perhatian pemerintah Propinsi Papua terhadap masyarakat Papua yang tinggal di Distrik dan pedesaan pada anggaran 2006 akan ditindaklanjuti. Dalam Waktu dekat akan merekrut 50 tenaga dokter dan akan ditempatkan di pedesaan sehingga bisa melayani langsung masyarakat ungap pejabat Gubernur Dr. Sodjuangon Situmorang.

21 Juni

Rencana Pemerintah Propinsi Papua Merekrut 50 tenaga dokter disambut positif oleh Komisi E DPRD Manuel Wetapo, diakui bahwa selama ini pelayanan kesehatan belum maksimal, untuk rencana perekrutan dan penambahan tenaga dokter ini diharapkan dapat menjawab masalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Papua ke depan.

I. Perlindungan terhadap perempuan dan anak

3 April

Alsipen penanggung jawab supermarket Yohan yang berada di Jl A.Yani Jayapura mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui pasti sehingga harga susu bayi mengalami kenaikan, namun yang jelas dari suplaier PT Sari Husada telah memberikan surat edaran mengenai kenaikan susu bayi dan susu ibu hamil yang berlaku untuk produk tertentu. Adanya kenaikan harga susu bayi dan ibu hamil dikatakan oleh Amin salah satu seorang pemilik toko sembako yang berada di pasar Hamadi Jayapura. Kenaikan susu bayi dan ibu hamil sejak hari senin tanggal 3 April kemarin, memang ada kenaikan harga tetapi tidak berlaku untuk semua produk, hanya beberapa produk saja yakni yang diproduksi dari PT Sari Husada.

5 April

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Sipora Mondow menjelaskan Gerakan sayang ibu adalah satu program yang sifatnya menyentuh langsung masyarakat. Gerakan sayang ibu merupakan program yang akan menjadi perhatian kami pada 2006. Program ini sangat penting untuk pelayanan kesehatan.

7 April

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Papua, Dra Sipora Modow mengatakan bahwa Sesuai amanat UUD 1945 dan komitmen pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi hak-hak anak maka semua pihak, baik Pemerintah, swasta dan masyarakat berkewajiban melaksanakan kemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah secara berkesinambungan. Hal itu dikatakan saat membuka acara lokakarya UU no 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diadakan oleh Jaringan Peduli Anak Bangsa di Aula diklat Propinsi Papua

12 April

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) serempak dilaksanakan dan telah memasuki putaran kelima untuk kabupaten Biak Numfor memproyeksikan 12.300 orang balita yang diimunisasikan polio pada putaran kelima. Kepala Subdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular Dinkes Biak Numfor A.M. Ridway Halim mengatakan bahwa jumlah selama Imunisasi dilakukan balita yang diimunisasi terus mengalami peningkatan.

12 April

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran 5 di Kabupaten Jayapura diwarnai dengan Antrian Panjang warga sentani, ternyata vaksin campak yang akan diberikan stoknya habis akibatnya warga harus menunggu hingga vaksin tersebut datang. Untuk Vaksin Polio sudah cukup tapi untuk vaksin campak memang kehabisan, stok vaksin campak yang ada di puskesmas tidak mencukupi, kata dokter Mala.

14 April

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Papua Dra. Sipora Moudouw mengatakan Pendidikan politik kepada kaum perempuan masih sangat kurang untuk itu pihaknya akan memberikan perhatian serius dengan pelatihan-pelatihan di bidang pendidikan Politik.

18 April

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan kota Jayapura mengatakan, meningkatnya kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta penyebaran virus HIV/AIDS di kota Jayapura dimana kasus ini diderita para ibu rumah tangga.

Aparat penyidik di Polres Papua selama 3 hari mengikuti pelatihan tentang hak-hak anak dan peradilan anak yang digelar di hotel Sentani Indah.

21 April

Dalam rangka memperingati Hari Kartini pengusaha asli Papua Ny. Ema Kabarek, Direktris CV Aru Papua Permai, meminta agar diberi kepercayaan dan tidak meragukan kemampuan. Pengusaha Papua yang perempuan sekarang punya potensi dalam memajukan ekonomi, baik untuk kemajuan masyarakat Papua maupun untuk Negara Indonesia umumnya. Hanya kadang kekurangan dana. Ia berharap agar jangan diberi pekerjaan sebagai paket pembinaan. Ia mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan kepercayaan untuk mengerjakan usaha dengan baik.

Disinyalir Banyak Balita di Biak kekurangan gizi karena pola makan yang hanya memperhatikan karbohidrat dan protein, maka asupan atau kandungan gizi makanan yang diberikan kepada anak kurang lengkap.

30 April

Propinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang tingkat kematian ibu dan anak sangat tinggi dimana dari survei terakhir disebutkan bahwa jumlah kematian mencapai 750 hingga 1313 orang per 100.000 kelahiran yang hidup. Tingginya angka kematian Ibu dan bayi baru lahir disebabkan oleh kurangnya pemerataan pelayanan.

4 Mei

Kasus perdagangan wanita yang belakangan ini menjadi mulai marak di daerah lain seperti di Jawa menjadi perhatian khusus aparat Polresta Jayapura. Pasalnya tidak menutup kemungkinan kasus tersebut bisa terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura.

Perhatian tersebut terlihat dalam kegiatan pelatihan VCD fungsi Reskrim gelombang I Tahun 2006 di Aula lantai II Polresta Jayapura, Kamis Kemarin.

16 Mei

Helena Adu, anggota MRP yang datang dari unsur perempuan untuk daerah pemilihan 11 Kabupaten Mappi bertekad mengangkat kaumnya dari ketertindasan. Helena mengakui bahwa kaum perempuan selalu menjadi obyek kekerasan di lingkungannya. Di Mappi, Helena melihat bahwa kaum perempuan masih terbelakang diakibatkan karena faktor pendidikan. Anak-anak perempuan di Kabupaten Mappi belum banyak yang mengenyam pendidikan formal. Ia berjanji mengangkat kaumnya dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat secara khusus kaum perempuan agar bisa mengalami pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi cita-cita hidup yang lebih baik.

25 Mei

Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat menyebutkan bahwa dari 2.346 anak dan balita yang berhasil didata bahwa 129 balita diantaranya mengalami gizi buruk.

26 Mei

Ketua Panitia Simposium Kesehatan kanker payudara dan leher rahim mengatakan angka kematian ibu (AKI) 307 per 100 ribu kelahiran hidup atau dengan kata lain 20 ribu perempuan meninggal per tahun yang terkait dengan kehamilan.

28 Mei

Selain gizi buruk banyak dialami balita dan anak-anak di Kabupaten Asmat ternyata kematian ibu dan anak tergolong tinggi di daerah tersebut, setiap tahunnya, terutama bagi mereka yang berada di kampung-kampung.

29 Mei

Angka kematian ibu dan anak di Papua dari survei terakhir disebutkan bahwa jumlah kematian mencapai 750-1313 orang per 100.000 kelahiran yang hidup. Kasubdin Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Marthen Sakrim dalam pertemuan review 6 bulan kemajuan pelaksanaan distrik team problem solving, di Aula Hotel Relat Indah membenarkan hal ini. Menurutnya faktor penyebab kematian ibu dan anak cukup tinggi adalah (1) kurangnya pemerataan pelayanan kesehatan (2) keadaan geografis yang tidak seimbang. Banyak masyarakat tinggal di daerah terpencil jauh dari pusat pelayanan kesehatan (3) tenaga medis sangat terbatas (4) kualitas pelayanan masih sangat rendah.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan sejumlah perempuan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli (Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi) RUU APP mengadakan demo di kantor DPRP. Mereka mengutarakan aspirasi yang berisikan menolak RUU APP karena mereka menganggap RUU APP sangat diskriminatif terhadap perempuan. Mereka menilai bahwa DPR RI buta terhadap pluralisme dan keragaman budaya. Perempuan punya harga diri dan nilai. Wakil Ketua (GMKI), Jon Betaubun yang juga ketua senat Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengatakan keberadaan RUU APP ini merupakan suatu bentuk penindasan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

13 Juni

Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu, M.Si, mengatakan masih ditemukan ada upaya mengeksploitasi hak-hak perempuan untuk kepentingan tertentu. Di kampung-kampung

masih banyak ibu-ibu hamil yang bekerja menghidupi keluarganya. Di Kota ada banyak ibu yang menjadi korban kekerasan laki-laki, baik kekerasan seksual, penganiayaan, pemukulan dan kekejaman lainnya. M.R Kambu dalam acara pembukaan sosialisasi gerakan sayang ibu, mengharapkan agar gerakan kasih sayang ibu semakin dihayati oleh setiap kita yang juga lahir dari rahim seorang ibu.

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura, Betty A. Puy, SE, menyayangkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak di wilayah kota Jayapura. Ia mencanangkan program kerja yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Ia menerangkan bahwa di desa-desa belum ada sarana kesehatan yang memadai sehingga menangani ibu yang bersalin agak susah. Ke depan ia akan membentuk kelompok kerja tetap (Pokjatap) di masing-masing kelurahan dan kampung yang bertugas menyusun dan melakukan program-program penanganan terhadap ibu hamil dan anak-anak yang sangat membutuhkan pertolongan. Pokjatap bertugas mencari donor darah bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil yang membutuhkan pertolongan.

17 Juni

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dalam keluarga Badan pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, Ny Adelce Kadde mengatakan bahwa setiap ibu rumah tangga dan anggota keluarga diharapkan dapat memahami tentang apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu dikatakannya karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi dan pelakunya adalah orang yang terdekat dalam rumah tangga sendiri.

19 Juni

Salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah para bidan. Namun kenyataan sekitar 70 % tenaga bidan belum pernah mendapat pelatihan, maka perlu ke depan pelatihan lebih ditingkatkan. Hal ini dikatakan Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Bagus Sukaswara saat membuka pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) di pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) Propinsi Papua. Dikatakan bahwa derajat kesehatan naik atau tidak salah satu indikatornya adalah dilihat dari angka kematian Ibu hamil dan anak.

29 Juni

Banyaknya kasus penyimpangan sosial yang selalu menimpa kaum ibu rumah tangga, terutama bagi para ibu-ibu hamil sehingga sering menyebabkan kematian hal ini disikapi serius oleh Pihak kantor pemberdayaan perempuan (KPP) Kota Jayapura Betti Puy; Kaum perempuan merupakan salah satu pionir yang melahirkan, membesarkan mendidik para generasi penerus bangsa untuk itu mereka harus diselamatkan dari kasus-kasus yang selama ini dialami.

J. Kebijakan Pendidikan yang timpang

5 April

Walikota Jayapura MR Kambu memperingatkan setiap sekolah yang ada di Kota Jayapura untuk tidak memungut biaya tambahan pada pelaksanaan ujian sekolah (UAS) dan Ujian Masuk Sekolah (UAN) karena Pemkot telah menyiapkan atau mengalokasikan dana penunjang UAS/UAN. Dana yang diplotkan bagi peserta UAS/UAN masing-masing: SD Rp 10 ribu/peserta, SMP Rp 30.000 ribu/peserta, SMA Rp 50.000/peserta, dan SMK Rp 110.000 ribu/peserta.

6 April

Sekolah-sekolah di Kota Jayapura merasa Dana Pemerintah Kota kurang sehingga tetap mengadakan pemungutan biaya untuk UAN dan UAS. Misalnya untuk SMK Negeri 3 sekolah tidak mungkin meminta bantuan orang tua siswa, mengingat tingginya biaya praktek. Kata Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jayapura. Katanya, memang ada bantuan dari pemerintah kota tujuannya supaya sekolah tidak memungut biaya. Berdasarkan jumlah idealnya untuk biaya UAN 2006 bagi SMK Negeri 3 berkisar 400.000/siswa sementara bantuan dari Pemkot hanya 110.000/siswa, sehingga sekolah tetap meminta partisipasi orang tua sebesar 300.000/siswa.

7 April

Wali Kota Jayapura MR Kambu menegaskan sekolah Negeri yang memungut biaya UAN dan UAS akan ditindak tegas. Tetapi untuk SMK boleh memungut biaya praktek 150 ribu – 200 ribu, tetapi harus berbicara dengan bersama antara komite sekolah, orang tua siswa/i.

10 April

Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Drs BJ Ohoilulun meminta pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan untuk biaya ujian masuk meski pendanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional belum dikucurkan Pemerintah Daerah. Menurutnya masih banyak cara yang bisa ditempuh tanpa harus meminta pungutan dari pada orang tua murid, katanya juga dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan panjar ke Pemda Merauke disamping Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan disalurkan sebagian disisihkan untuk pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional.

11 April

Sikap tegas Walikota Jayapura MR Kambu untuk menindak tegas setiap sekolah negeri yang sengaja menarik atau memungut biaya ujian akhir sekolah (UAN/UAS) dinilai oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Iwanul Muslimin bahwa itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Diharapkan supaya Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura duduk bersama dengan pihak sekolah untuk membicarakan masalah biaya UAN/UAS.

12 April

Sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan pada pelaksanaan UAS/UAN nanti jika ada maka akan diberikan sanksi Administrasi. "Bila dihitung secara rasio, alokasi anggaran dari Pemkot telah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan UAS/UAN demikian dikatakan oleh Dra. W.W. Kambuaya Kepala Dinas Pengajaran Kota Jayapura (P dan P).

17 April

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Feliks Rumbewas Meminta kepada seluruh sekolah untuk tidak menarik pungutan dari orang tua murid pada pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN). Untuk pelaksanaan UAN pihak tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor mendapat alokasi dana sekitar Rp 1,5 miliar dana itu akan segera kami alokasikan ke masing-masing sekolah.

Rawan pangan di Kabupaten Yahukimo yang berpenduduk 172 ribu jiwa membawa dampak juga pada nasib guru. Guru akan mendapat insentif 1 juta per bulan, uang transport 1 juta per bulan dan honor Rp 750.000,00 per bulan. Hal ini dikatakan Sekretaris Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesko Kesra) Soetedjo. Di Yahukimo

sudah ada 139 pendidik yang akan disebarkan ke 17 Sekolah Dasar (SD). Dalam menangani kelaparan di kabupaten tersebut pemerintah sudah menghabiskan dana 45 milyar dari APBN 65 milyar. Sisa 20 milyar akan dipakai untuk membangun fasilitas di Yahukimo. Selain dana 65 milyar pemerintah juga sudah mendistribusikan 465 ton beras dan 212 ton ubi.

21 April

Terkait dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) Yayasan terpaksa tetap menarik pungutan dari siswa, walaupun ada bantuan dari pemerintah namun bantuan itu tidak mencukupi kebutuhan di sekolah diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA YPK 2 Sentani Yan Pieter Youm.

25 April

Kegiatan Belajar mengajar di Manokwari lumpuh total karena pencairan dana BOS yang sudah disampaikan para kepala Sekolah sebelumnya tidak ditanggapi pemerintah Kabupaten Manokwari. Semua sekolah SD sampai SMP ditutup tak melaksanakan proses belajar mengajar. Aksi mogok ini sudah dilaksanakan oleh Kepala sekolah-sekolah penerima dana BOS. Kepala Sekolah SMP YPK Fanindi Manokwari, JP Baiba katanya bahwa pihaknya akan melakukan aksi ini hingga Pemerintah Propinsi IJB mencairkan dana BOS.

26 April

Kepala BP3D (Badan Perencanaan dan Penguasaan Pembangunan Daerah) Propinsi Papua Drs. Marthinus Howay mengatakan pada anggaran 2006 dana pendidikan yang diusulkan 30% sekitar 8% diantaranya untuk membiayai pendidikan tinggi. Menurutnya bahwa dalam amanat Otsus tidak ada perbedaan antara pendidikan tinggi, menengah maupun pendidikan Dasar.

APBD untuk pendidikan Papua sebesar 180 milyar sedangkan program Dinas Kebudayaan menganggarkan 4 milyar dan tinggal menunggu pembahasan RAPBD Perpustakaan Daerah dapat alokasi dana 10 milyar.

27 April

RAPBD tahun 2006 nilai anggaran sebesar Rp. 4,01 triliun atau naik 1,51 persen atau 38,68 %dibandingkan tahun 2005, namun dana pendidikan hanya dialokasikan 188,27 Miliar atau hanya 4,7% saja.

28 April

The institute for Civil Society Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, mengkritik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2006. Dinilai bahwa anggaran untuk pendidikan sangat kecil (Rp 188,27 milyar atau 4,7 persen dari total anggaran Rp 4,01 triliun. Dana kesehatan Rp 196,29 miliar atau hanya 4,8 persen. Hal ini disayangkan karena menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), dana kesehatan untuk masyarakat sebesar 15 persen dari total belanja daerah. Tahun 2006 total belanja daerah berjumlah 4.015,57 triliun. Maka dana kesehatan Provinsi Papua tahun 2006 seharusnya berjumlah Rp 602,5 milyar. Direktur Eksekutif ICS, Budi Setyanto, SH. mengatakan bahwa anggaran pada tahun 2006 ini sangat mengabaikan hak-hak masyarakat. Dikatakannya bahwa anggaran kesehatan tersebut jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Provinsi Papua sebanyak 1.630.107 (Papua dalam tahun 2004/2005), maka akan mendapat Rp 120.000 per tahun atau rata-rata Rp 10.000 per bulan. Sedangkan perawatan kesehatan

Gubernur Rp 124,2 juta per tahun dan Wakil Gubernur 150 juta per tahun. Pengalokasian dana yang dinilai tidak adil ini, ternyata hanya digunakan untuk memperkuat institusi pemerintahan dan aparat. Dari hasil kajian analisis ICS Papua ternyata Rp 39,72 milyar atau 20,23 persen dari total kesehatan dikuras oleh aparatur pemerintah provinsi untuk biaya: perjalanan dinas, uang makan dan minum, honor, insentif biaya cetak/pengadaan dan jasa pihak ketiga.

1 Mei

Di Manokwari 40 siswa SMKN 2 tidak ikut UAN dengan alasan belum melunasi pembayaran BP3. Sekolah mengambil kebijakan tersebut berdasarkan tata tertib sekolah yang disepakati bersama. Siswa yang tidak ikut UAN mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Menengah dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Mereka menemui salah satu staf dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka meminta agar diberi kebijakan dari dinas supaya dapat mengikuti ujian hari kedua. Pasalnya, mereka semua berasal dari keluarga yang tidak mampu dan diharuskan untuk membayar uang ujian. Atas permintaan itu, mereka diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ujian hari kedua. Mereka puas bisa mendapat jalan keluar dengan kebijakan dari dinas untuk bisa mengikuti UAN hari kedua.

Pada Hari Pendidikan Nasional Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs. James Modouw, MM mengatakan bahwa pembangunan pendidikan di Papua, membawa kemajuan yang positif. Sekarang jumlah guru seluruhnya di Papua berjumlah 27.000 orang yang mengajar diribuan sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMU. Jumlah tersebut sudah termasuk guru kontrak dan guru PNS. Di daerah pedalaman banyak kekurangan tenaga guru maka lebih ideal jika jumlah guru mencapai 30.000 orang. Namun ditegaskan bahwa pengangkatan guru adalah wewenang kabupaten dan kota.

Walikota Jayapura Drs. MR Kambu mengatakan bahwa masalah pendidikan di kota Jayapura merupakan tanggung semua pihak-pihak atau komponen bangsa yang ikut dalam penyelenggaraan pendidikan. komponen itu terdiri kalangan orang tua, pemerintah setelah dan kelompok bangsa yang iut dalam penyelenggaraan pendidikan.

3 Mei

Papua yang dikatakan idealnya membutuhkan 30 ribu guru sebagai mana diungkapkan PLH Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua, Drs James Modouw hal itu dikatakan karena tahun 2002 yang lalu Propinsi Papua hanya kekurangan guru sekitar 7000 dan hingga saat ini tidak melakukan penambahan. Datanya sedikit diragukan keakuratannya. Jumlah 30 ribu guru tersebut dianggap terlalu besar, jika dibanding dengan fasilitas yang tersedia seperti gedung sekolah yang ada di Papua. menurut pengamat pendidikan Universitas Cendrawasih Drs. Festu Simbiak, M.Pd.

Sejumlah sekolah di Papua Rusak berat, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs, James Modow, MM mengatakan bahwa "Sekitar 60 persen sekolah di Papua kondisinya dalam keadaan rusak berat, sekolah umumnya rusak berada di daerah Pengungan Tengah dan Daerah Selatan dan paling banyak adalah Gedung Sekolah Dasar (SD)

Kepala Sekolah SMA N 4 Entrop, Engel Yeuyanan, S.Pd. menjelaskan dalam rangka peningkatan mutu sesuai dengan otonomisasi sekolah maka dalam pelaksanaan UAS, SMA N 4 Entrop menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) dengan proses

pengoreksiannya menggunakan alat Scan 12 dirangkaikan dengan komputer maka proses pengoreksiannya lembar jawaban akan semakin cepat dan akurat.

Wakil Bupati Asmat FB Sorring tentang pendidikan di kabupaten asmat dengan realitas kehidupan masyarakat tersebut, menurutnya langkah yang ditempuh pemerintah daerah dengan mengkampanyekan budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Adat akan membantu tetapi tetap mengatur masalah adat, tetapi juga mendorong anak-anak untuk sekolah

Dana Dekonsentrasi Pendidikan Rp. 15 M dikembalikan ke Pusat, hal ini dikarenakan Kinerja Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata yang dinilai kurang baik dalam mengelola Dana tersebut secara maksimal. Diungkapkan Komisi E DPRD IJB dalam rapat Paripurna dewan, maka Komisi E mengusulkan untuk mereka yang tidak bekerja secara profesional untuk diganti.

4 Mei

Ribuan anak-anak Papua tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Privinsi Papua Drs. James Modouw, MM. 52,86 persen tamatan SD tidak bisa lanjut ke SMP. Alasan utamanya adalah isolasi geografis. Letak kampung dan desa sangat jauh dari pusat pendidikan SMP. Misalnya di Kampung Soba Kabupaten Yahukimo anak-anak SD Inpres Soba anak-anak sulit melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP karena SMP letaknya jauh di Kurima atau Ninia. Sementara dari Soba ke Ninia atau Kurima terpisah oleh gunung, lembah dan sungai ratusan kilometer. Transportasi yang digunakan untuk sampai ke tempat itu hanya dengan pesawat. Untuk berjalan kaki membutuhkan waktu berminggu-minggu.

Memperhatikan, kampung Moso Distrik Muara Tami belum memiliki Gedung Sekolah anak-anak belajar di gereja dan Gurunya Anggota TNI, Praka Danang Supriyadi. Di sela-sela kunjungan Walikota Jayapura MR Kambu terungkap bahwa perhatian pemerintah terhadap 66 jiwa (19) KK di daerah ini masih sangat minim. Bahkan 30-an anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan dengan baik

Walikota Jayapura M.R. Kambu mengatakan pada anggaran 2006 ini, pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura tetap akan fokus pada masalah mutu pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan penyiapan SDM harus menjadi titik perhatian utama agar mampu merubah struktur dan kualitas SDM yang memiliki daya saing produktivitas tinggi dalam membangun masyarakat Papua pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Jayapura.

5 Mei

Belum ada gedung sekolah di Kampung Moso, Distrik Muara Tami dan menyebabkan anak-anak di kampung itu belajar dalam gereja, ditanggapi serius Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura, Dra WW Kambuaya ; dikatakan pada prisipnya Pemkot akan berupaya agar para anak-anak di Kampung Moso bisa mengenyam pendidikan dengan baik, namun persoalan terlebih dahulu akan dibicarakan dengan walikota.

8 Mei

Pembangunan daerah selalu mengfokuskan pada pembangunan pendidikan namun masih banyak persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. Disampaikan oleh Gubernur

Papua.berdasarkan hasil indentifikasi yang sudah dilakukan angka pendidikan masih banyak persoalan diantaranya : buta aksara, wajib belajar 9 tahun, sekolah yang rusak.

10 Mei

Ratusan mahasiswa STIA Karya Dharma Merauke melakukan aksi demo. Aksi demo damai ini berkaitan dengan suksesi kepemimpinan STIA Dharma Merauke. Kelompok mahasiswa yang mewakili mahasiswa dari empat kabupaten, yaitu mahasiswa asal Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Demo mahasiswa ini diterima oleh pelaksana tugas STIA Karya Dharma Drs. Harry Soepomo, MM, Ketua Yayasan Karya Dharma Merauke, Drs. H.Nazori, Pembantu Ketua II STIA Karya Dharma Drs. H. Maskikit dan sejumlah pengurus serta beberapa dosen. Di hadapan pengurus STIA Karya Dharma seorang perwakilan mahasiswa STIA Karya Dharma, Yoseph Gebze menyampaikan beberapa aspirasi dan pernyataan sikap antara lain (1) menolak dengan tegas isu putera daerah dan agama dalam konteks apapun untuk kepentingan sesaat atau pribadi. (2) Menolak orang dari luar STIA Karya Dharma menjadi pimpinan (3) menindak dengan tegas kepada mereka yang melakukan pemerasan kepada mahasiswa dalam bentuk apapun (4) meminta agar Drs. Harry Soepomo segera didefenisikan sebagai Ketua STIA Karya Dharma.

11 Mei

Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Propinsi Papua mengatakan bahwa sebanyak 14 wilayah terisolir hingga saat ini belum memiliki sekolah. Adapun wilayah yang kabupatennya terisolir Kabupaten Sarmi, Kabupaten Bouven Digul, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen dan wilayah lainnya.

15 Mei

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Drs. Nirwanto mengakui bahwa standar kelulusan siswa tahun ini cukup berat dengan standar 4,261 ke atas. Sedangkan untuk rata-rata harus di atas 4,51 naik dari standar sebelumnya 4,25. Siswa yang tidak lulus tidak ada ujian susulan tetapi mengulang selama setahun dan mengikuti ujian tahun depan. Ujian susulan hanya untuk siswa yang selama Ujian Akhir Negara (UAN) berhalangan.

16 Mei

Sejumlah sekolah di Kabupaten Mimika rusak berat. Data yang diperoleh ada 219 ruang kelas yang rusak. Dari 219 ruang kelas yang rusak, 83 diantaranya rusak ringan sedangkan 136 rusak berat. Tingkat kerusakan menurut jenjang pendidikan untuk SD 54 ruangan rusak ringan sedangkan 119 rusak berat. Untuk tingkat SMP 19 ruangan rusak ringan dan 15 ruangan rusak berat. Tingkat SMA 10 ruangan rusak ringan dan 6 rusak berat. Diperkirakan dana yang dibutuhkan memperbaiki 219 ruangan itu sebesar Rp 27 Milyar. Dari anggaran ini Pemda Mimika menanggung 8 Milyar, Provinsi Papua Rp 5 Milyar dan Pemerintah Pusat Rp 14 Milyar. Hal ini dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika, Ausilius Youw, Spd., dalam pertemuan antara Bupati/Walikota serta Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran se-Propinsi Papua bersama Mendiknas di Rumah Negara Gubernur Papua di Jayapura

17 Mei

Perhatian Pemerintah terhadap persoalan Pendidikan di Papua terus ditindaklanjuti, dengan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Pejabat Gubernur Papua dan Bupati, walikota se-

Papua dengan maksud menuntaskan tiga persoalan utama Pendidikan di Papua yang dianggarkan Rp 842.379.369.000. demi pembiayaan Program penuntasan Wajib belajar 9 tahun, Rehabilitasi Gedung SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK kemudian Penuntasan Buta Aksara dan Peningkatan Kesejahteraan Guru.

Pembagian Alokasi dana :

- ◇ Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 421.189.648.500
- ◇ Kabupaten dan Kota menanggung 30 %
- ◇ Propinsi menanggung 30 %

PROGRAM	Anggaran
Program Penuntasan Wajib belajar 9 tahun	Rp : 393.749.620.000
Rehabilitasi Sekolah	Rp :155.712.799.000
Penuntasan Buta Aksara	Rp :27.396.000.000
Sedangkan untuk kesejahteraan guru di pertimbangkan kemudian	
Total Dana	<u>Rp 842.379.369.000</u>

20 Mei

Bupati Yahukimo Ones Pahabol yang didampingi Ketua DPRD Didimus Yahuli dan Kapolres Kopol Daniel dan salah satu staf ahli Wapres Fabiola Ongge melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah serta berbicara-bincang dengan guru-guru dan Kepala sekolah di Distrik Ninia, dengan mendapat keluhan dari banyak guru yang tidak ada di tempat tugas. Pertemuan itu terungkap bahwa 17 guru baik dari tingkat SD sampai SMP tidak berada di tempat, maka Bupati mengeluarkan peringatan bagi 17 guru malas itu.

23 Mei

Diperkirakan puluhan sekolah dasar (SD) sejumlah kampung di Kabupaten Asmat tidak dapat mengikuti ujian nasional kondisi mengingat proses belajar mengajar bagi anak-anak yang mengikuti ujian di sekolah itu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Menurut Kabid TK/SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Asmat, Amatus Ndatipits mengatakan bahwa Kabupaten Asmat tercatat 4 SD yang kelas IV tidak ikut ujian karena proses belajar mengajar lumpuh. Sekolah berada di Tomoro, Amandep, Nogoni dan SDN Inpres Biwar Darat. Adapun masalah yang diungkapkan Amatus yaitu : sejak 1995 pendidikan mulai kacau saat isu kayu gaharu, saat orang tua masuk ke hutan dengan membawa anak-anaknya

22 Mei

Masih banyak anak-anak di Papua yang belum bersekolah Kata Ketua Darma Wanita Persatuan (DPW) Provinsi Papua Ny Ernie I Kristantus mengatakan bahwa dari 131.471 anak yang terdaftar sekitar 61,86 yang tidak sekolah. Data tersebut belum termasuk 5 kabupaten lainnya : Puncak jaya, Mappi, Asmat, Pegunungan Bintang dan Tolikara.

25 Mei

Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Kota Jayapura, mengalokasikan anggaran untuk bantuan studi. Alokasi dana Rp 400 juta berasal dari dana Otonomi Khusus, tujuan untuk membantu para mahasiswa kita yang menyelesaikan studi.

26 Mei

Sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Biak Numfor dalam kondisi rusak dan perlu untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kota-kota yang dilaporkan pada umumnya berada di luar kota Biak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, Feliks Rumbewas menjelaskan bahwa Sekolah SD yang rusak berat diperkirakan berjumlah 123 SD

27 Mei

Drs. Muhammad Yusuf mengatakan jumlah buta aksara di daerah ini masih cukup besar tetapi komitmen pemerintah angka buta aksara di Papua pada 2009 ditargetkan turun 50%. Pada anggaran 2006 sendiri pihak Dinas P & P Propinsi Papua akan membuat bimbingan belajar di setiap daerah dengan 10.000 warga belajar, Warga belajar ini akan mendapat bimbingan di masing-masing Kabupaten/Kota dengan tetap menggunakan fasilitator desa intensif (FDI) atau fasilitator di masing-masing daerah.

14 Juni

Ratusan siswa SMP Negeri IV Manswan Biak tidak mengikuti ulangan semester karena sekolah mereka dipalang oleh keluarga besar Simopiaref selaku pemilik tanah ulayat. Alasan pemalangan berkaitan dengan pemberhentian Yoseph Simopiaref sebagai kepala SMPN IV tanpa pemberitahuan kepadanya secara resmi. Selain itu pengangkatan kepala sekolah SMPN IV yang baru tidak sesuai dengan pasal 7 dan 8 keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai kepala sekolah. Masyarakat suku Simopiaref masalah ini akan selesai jika pengangkatan kepala sekolah tetap dari suku mereka. Untuk sementara sekolah ini tidak melaksanakan ujian dengan batas waktu yang belum ditetapkan.

15 Juni

Ketua DPRD Biak Numfor, Nehemia Wospakrik SE, B.Sc, menyayangkan aksi pemalangan sekolah di SMPN IV Manswan Biak. Ia menilai aksi ini merugikan masyarakat sendiri yaitu siswa dan orang tua. Persoalan ini memang sudah dibicarakan dalam dewan dan saat ini Komisi D sedang menanganinya. Nehemia sangat menyayangkan aksi pemalangan yang berbuntut pada kemacetan pendidikan di Biak sendiri. Ia berharap agar masyarakat memakai jalur ke dewan untuk membahas masalah sosial ini bersama.

19 Juni

Kualitas pendidikan dan jumlah murid taman kanak-kanak (TK) khususnya putra-putri Papua yang berasal dari Kabupaten Keerom masih sangat kurang, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah, masyarakat dan khususnya orangtua siswa. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pengerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Keerom Ny Fransiska Ni Made S Watae.

22 Juni

Setelah mendatangi kantor P dan P Propinsi Papua sejumlah anaknya tidak lulus UAN kembali mendatangi kantor DPRP, mereka meminta dilakukan ujian ulang dan juga agar sistem penilaiannya berubah. Seorang perwakilan orang tua siswa Ibu rewang menegaskan, dirinya tidak mengerti dengan sistem penilaian hasil UAN yang diterapkan secara sentralistik mulai dari pusat hingga ke daerah sementara pembangunan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.

22 Juni

Demo Perwakilan Orang tua siswa/i yang anaknya tidak lulus ujian akhir nasional (UAN) disikapi serius oleh Komisi E DPRD bahkan dalam waktu dekat ini akan memanggil Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Propinsi Papua untuk klarifikasi kenapa banyak siswa SMA/SMK tidak lulus UAN. Dikatakan oleh dr John Manangsang, anggota Komisi E DPRD.

27 Juni

Pada pembukaan pelatihan calon motivator Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di kampung Jaifuri Arso 3 Distrik Skamto, Wakil Bupati Wahfir Kosasih mengungkapkan bahwa sejumlah kampung di Keerom belum memiliki sarana pendidikan yang memadai, walaupun ada sarana sekolah sudah tidak layak bahkan kondisi ini diperparah dengan tidak ada guru yang mengajar di sekolah. Hal ini berpengaruh pada terhambatnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Keerom.

K. Pasar di Jayapura

2 April

Pemda kota desak tata ulang Eks Pasar Ampera. Rencana penataan lokasi eks Pasar Ampera yang digusur sejak bulan November 2003 lalu sampai saat ini belum ditindak lanjuti. Rencana pembuatan taman hiburan dan penataan secara baik dengan tujuan dijadikan sebagai Kawasan konservasi, nampaknya hingga saat ini juga belum dilakukan. Belum tertatanya secara baik lokasi eks Pasar ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Julius Mambay, ia meminta pemda Kota atau Dinas teknis terkait menindak lanjuti rencana penataan eks Pasar Ampera tersebut.

14 April

Kepala Disperindag Kabupaten Jayapura Drs. Samule Padollo mengatakan bahwa kios-kios di Pasar Baru Prahar ini dalam dalam waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Jayapura akan menata kembali kompleks pasar tersebut dengan menghidupkan jalan di bagian belakang pasar Pharaa. Menurut Padollo bahwa sampai saat ini belum semua kios pasar Pharaa dimanfaatkan dengan baik, beberapa waktu lalu hanya dikenakan retribusi saja, bila penataan kembali pasar dilakukan pemerintah sudah menetapkan untuk menarik sewa dari masyarakat yang menempati kios-kios.

17 April

Keberadaan Pasar Yotefa Kotaraja keberadaan kios-kios kosong kata sejumlah pedagang PKL enggan menempati tempat tersebut karena tempat kurang ramai dan jarang dikunjungi.

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk membangun kembali pasar di Dok IX rupanya akan terealisasi sebab rencananya sudah di program dalam APBD Kota jayapura pada 2006. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura, Drs. Partono.

21 April

39 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggiran lapangan Karang Ampas di jl. Kelapa Dua Entrop ramai-rami mendatangi kantor walikota, memprotes tempat jualan mereka dibongkar oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Jayapura. Seorang perwakilan bernama Yusuf Kafiir mengatakan bahwa Pasar Hamadi dan Eks Pasar Ampera yang kondisinya semakin semrawut tidak ditertibkan, kenapa kios yang

hanya mengikuti arus jalan lalu dibongkar. Menurutnya bahwa pembongkaran itu tidak wajar dan tidak didasar atas surat resmi yang ditunjukkan kepada para penjual.

31 April

Pungutan liar (pungli) di Pasar Yotefa semakin meresahkan masyarakat. Pungutan liar ini dilakukan oleh sekelompok orang yang kadang mabuk dan memaksa setiap taksi yang masuk untuk membayar sesuai jumlah penumpang yang ada dalam taksi tersebut. Hal ini meresahkan masyarakat. Masyarakat pengguna pasar mengharapkan ada jalan keluar dari pihak keamanan, agar bisa menertibkan keamanan di lingkungan pasar.

2 Mei

Pasar Yotefa Kotaraja kini kondisi keamanannya mulai terusik, pasalnya kios-kios yang ada didalam pasar itu sepertinya mulai menjadi incaran pencuri. Kios milik seorang pedangan bernama Lamuansa hari rabu 3 Mei dini hari pukul 03.30 wit kiosnya dimasuki tamu yang tak diundang, barang dangannya seperti roko, minuman serta uang Rp. 2.1 juta amblas.

3 Mei

Guna mengoptimalkan perputaran roda perekonomian di masyarakat, maka pemerintah Kota Jayapura akan menata dan menertibkan pasar-pasar penyangga yang ada. Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura Partono H.S mengatakan tujuan penataan tersebut agar keberadaan pasar penyangga tersebut tidak semrawut.

18 Mei

Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura Partono H.S mengatakan bahwa Untuk mengatasi kebocoran penerimaan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kota Jayapura, pihaknya akan melakukan penertiban retribusi, khususnya retribusi tempat jualan pada setiap pasar. Penertiban sudah dilakukan mulai dari senin kemarin.

19 Mei

Walikota Jayapura M.R. Kambu mengatakan bahwa dalam anggaran 2007 mendatang pemerintah kota Jayapura akan berupaya mengoptimalkan pasar pelintas batas di Skow Mabo Distrik Muara Tami. Maksud pengaktifan pasar lintas batas itu adalah dalam rangka menjalin hubungan perdagangan di perbatasan antara kedua negara (PNG dan RI) dalam hal ini Kota Jayapura.

23 Mei

Pedagang Pasar Youtefa melakukan ronda malam secara bergiliran setiap malam 20 orang dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya pencurian dan kebakaran. Kata Aziz Pemilik Bengkel di Pasar Yotefa mereka melakukan ronda malam.

26 Mei

Keberadaan pasar penyangga disejumlah kota tampaknya belum ditangani secara lebih baik, dikatakan oleh seorang pemerhati. Tempat penjualan pasar penyangga ini ada di beberapa titik, namun menurut penjual yang berjualan di Ekspo bahwa sudah berjualan suasana bahwa berjualan di ekspo hanya mereka beberapa orang saja, menurutnya tempat ini dekat dengan rumah dan juga tidak mendapatkan pasar di Yotefa kota raja.

21 Juni

Adanya keluhan dari masyarakat tentang kondisi pasar Yotefa Kotaraja khususnya di los penjualan karena sering terjadi genangan air disikapi serius oleh Kepala Dinas Pasar Kota Jayapura, Partono H.S. Dikatakan bahwa hal itu disebabkan karena tidak adanya drainase yang baik sehingga jika hujan turun maka air yang ada tidak lancar mengalir ke saluran induk. Untuk menangani persoalan itu pihaknya telah memprogramkannya dan sudah dimasukkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) jangka menengah Pemerintah Kota Jayapura pada 2007 mendatang.

Bagian II

Analisis Borok-Borok

Potret peristiwa di Papua selama tiga bulan ini belum banyak berubah dibandingkan dengan masa sebelumnya karena sebagian merupakan kelanjutan dari apa yang telah terjadi dalam triwulan pertama tahun ini. Namun demikian dari catatan peristiwa yang dicatat oleh SKP di atas, terdapat berbagai hal penting yang perlu digarisbawahi dan disoroti secara memadai. Secara umum, kita dapat melihat bagaimana berbagai borok-borok kemanusiaan ditelanjangi selama triwulan kedua ini baik oleh kalangan pemerhati HAM, kalangan lembaga tinggi negara, media massa, dan komunitas internasional.

Dalam ranah hak-hak sipil dan politik, ada empat borok besar yang paling mengisi ingatan dan memicu emosi masyarakat Papua, Indonesia, dan dunia pada umumnya. [A] Perkara pertama menyangkut kehebohan 43 pencari suaka ke Australia dan hanya 1 yang tidak langsung mendapat suaka sementara. Perkara ini menjadikan politisi di Jakarta dan Canberra ribut. [B] Perkara kedua adalah pengadilan kasus Abepura yang berkaitan dengan [C] konflik antara rakyat melawan PT Freeport Indonesia. [D] Perkara ketiga adalah konflik Pilkada Gubernur Papua. [E] Kebijakan pertahanan dan keamanan

Dalam ranah hak-hak ekososial, SKP terus mencatat terkuaknya berbagai borok layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. [F] kasus-kasus korupsi dan [G] hiruk pikuk Otsus merupakan contoh-contoh terang bagaimana pejabat-pejabat publik tidak melayani kepentingan publik yang berdampak pada [H] keterpurukan layanan kesehatan masyarakat yang langsung berdampak buruk terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan: [I] ibu dan anak dan [J] ketimpangan pendidikan, serta [K] ekonomi rakyat: tersingkirnya pasar tradisional.

I. Hak Hidup

Selama triwulan ini, tercatat bahwa semua politisi di Jakarta dan Canberra, Australia, sibuk berdebat tentang 43 pencari suaka politik dari Papua. Dari jumlah tersebut 42 orang telah mendapatkan visa perlindungan sementara sementara 1 orang menantikan proses pemeriksaan dari pihak Imigrasi Australia yang terkenal amat teliti dan ketat dalam memberikan izin masuk bagi orang asing. Persoalan ini memanasakan lagi hubungan Australia-Indonesia yang mulai membaik pasca Bom Bali dan bencana tsunami Aceh.

Jika diletakkan dalam kerangka paham HAM, pencari suaka adalah hak asasi mengingat pencari suaka adalah pihak yang nyawanya sungguh-sungguh terancam dan kemungkinan terakhir adalah lari dari wilayah dimana dia tinggal. Pelarian ini bukan semacam piknik ala turis atau migrasi ala konglomerat yang membeli rumah di luar negeri melainkan ini soal mati-hidup. Ini tidak main-main.

Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri. (pasal 12 ayat 1 Kovenan Internasional Sipil dan Politik)

Persis ini soal yang dialami oleh para pencari suaka dari Papua. Mereka merasa nyawanya terancam saat tinggal di Papua dan harus pergi ke negara lain untuk menyelamatkan diri. Kita pasti tidak lupa akan peristiwa pengungsian besar-besaran tahun 1984-1988 dari Papua ke Papua New Guinea dan akhir tahun 2000. Karena itu peristiwa ini sama sekali tidak unik atau yang pertama kali tetapi sudah terjadi sebelumnya bahkan dalam skala yang jauh lebih besar. Peristiwa ini menjadi besar karena Australialah yang menampung mereka sehingga luka lama karena campur tangan negara tetangga ini di Timor Leste kembali mencuat. Peran pers di Australia amat menentukan dalam menyoroti perkara ini dan hobi untuk menggambarkan keadaan Papua sebagai keadaan perang. Namun ironisnya, pemberitaan yang tidak berimbang dan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik di Australia tidak dapat dikurangi justru karena Papua tertutup bagi pers asing.

Suasana 'musuh dalam selimut' ini bukanlah hal baru dalam hubungan bilateral kedua negara karena sejak tahun 1950an di saat New Guinea Barat mulai menjadi pokok sengketa antara Belanda dan Indonesia, Australia lebih berpihak pada Belanda untuk tetap mempertahankan kekuasaan di Papua. Posisi politik ini berubah sesaat Amerika Serikat menjatuhkan pilihannya pada Indonesia akibat kecondongan Soekarno kepada Blok Komunis sewaktu perang dingin. Sebagai anggota pakta pertahanan ANZUS, Australia harus mengikuti perintah komandannya, Amerika, untuk pindah haluan meski publik tetap mendukung rakyat Papua.

Latarbelakang sejarah ini terus memainkan peran penting bagi perpolitikan Australia dan Indonesia dalam hal Papua. Maka tak heran DPR Pusat, DPD, Dubes Indonesia untuk Australia sibuk melobi parlemen dan politisi Australia di tengah berbagai kritik dalam negeri (4 April 2006). Mereka mencoba membatalkan keputusan Canberra (7 April 2006) dan dijawab oleh PM John Howard (18 April 2006) bahwa Australia tidak akan mengubah keputusannya meski ada rancangan UU untuk memperbaiki keimigrasian Australia (14 April 2006).

Yang menarik dari serangkaian fakta ini adalah bahwa Jakarta tidak pernah bertanya kepada rakyat Papua apa yang sebenarnya membuat mereka takut dan lari mencari suaka; atau bertanya kenapa mereka bicara mengenai 'genosida'; atau mengapa mereka minta 'merdeka'. Fakta yang tak kalah menarik untuk dicermati adalah tuduhan kepada Gereja-gereja di Papua sebagai pihak yang menggerakkan separatisme di Papua. Tuduhan ini mengisi panggung politik Jakarta sebagai tanggapan atas pergunjungan Papua di publik Australia. Sejumlah politisi dan media Islam beraliran kanan seperti Sabili terang-terangan mengkaitkan hal ini.

Di tengah kritik publik terhadap langkah lobi di Australia, dua bulan kemudian Komisi I DPR (1 Juni 2006) yang dipimpin Yoris Raweyai mengunjungi Papua. Namun, kunjungan ini senyatanya tak lebih daripada silaturahmi sebagai pelengkap penderita bagi kunjungan marathon berbagai lembaga tinggi negara ke Australia. Ini terbukti dari tidak adanya tindak lanjut dari kunjungan ini di tingkat Jakarta yang melahirkan satu langkah politik yang menjawab akar masalah pencari suaka tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan langkah defensif daripada memperbaiki keadaan HAM di Papua sebagai solusi terbaik.

II. Dicari: Pemimpin Papua

Drama pilkada gubernur Papua mencapai antiklimaks. Alih-alih disepakati satu pasang pemimpin, terjadi serangkaian tarik-menarik politik yang pada akhirnya memberi pelajaran kepada rakyat bahwa mencari pemimpin sejati memang sulit. Setelah energi dicurahkan dalam masa kampanye, kini puncak Pilkada Gubernur tiba: perhitungan suara dan pengumuman pemenang. Kita lihat bahwa para petarung politik terbukti lebih suka mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya mati-matian walaupun sudah kalah dalam pemilihan yang dilangsungkan secara bebas dan rahasia serta disahkan oleh lembaga independen: KPUD Papua. Tiga dari empat pasangan kandidat yang kalah: Lukas Enembe-Aituarauw, John Ibo-Kossay, dan Wabiser-Inaury mengajukan gugatan terhadap KPUD ke Mahkamah Agung. Hanya pasangan Karma-Mote yang secara ksatria menerima keputusan KPUD dan tidak mengajukan gugatan.

Saat MA menyatakan pasangan Suebu-Hesegem menang secara sah, pendukung Enembe mengamuk di ruang sidang dan menganiaya Ferry Kareth, Yohanis Bonay, serta anggota KPUD yang lain (23 Mei). Drama ini belum berhenti. Pendukung pasangan Enembe-Aituaraw masih berdemo ke Depdagri Jakarta dengan membentuk Forum Pembela Demokrasi Papua (29 Mei) sedangkan John Ibo menggunakan kekuasaan di DPRD dengan membentuk Pansus DPRD untuk menyelidiki ijazah palsu Suebu (6 Juni). Jika yang satu memakai cara fisik, yang lain memakai langkah hukum tetapi intinya sama: memperlambat dan sedapat mungkin membatalkan keputusan MA. Langkah ini tidak hanya menjadikan proses pelantikan Gubernur dan Wagub terpilih dan sah terkatung-katung sehingga jalannya pemerintahan tersendat-sendat melainkan mengatakan bahwa 'peduli amat dengan keputusan hukum'.

Melihat situasi ini, Wakil Ketua DPRD, Komarrudin, mengambil langkah untuk mempercepat proses pelantikan dengan mengirim surat ke Mendagri. Anehnya, langkah ini justru langsung dikecam sebagai ilegal, tidak sah dan liar oleh John Ibo sehingga menjadi polemik hebat di media setempat. Ketua DPRD, Pejabat Gubernur, dan Sekjen Presidium Dewan Papua menyerukan agar konflik ini diselesaikan karena tidak membawa keuntungan bagi masyarakat tetapi seakan-akan seruan ini menguap dibawa angin.

Karena soal penyelidikan ijazah palsu Suebu makin berlarut-larut, pasangan terpilih akhirnya mengambil jalan mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 510 milyar terhadap John Ibo. Konflik makin runyam, DPRD terpecah dalam kubu-kubu dan saling menyalahkan. Demikian pula di tingkat masyarakat akar rumput. Dalam keadaan sedemikian Mendagri Ma'ruf justru mengeluarkan surat yang meminta DPRD melakukan proses ulang pengesahan pengangkatan Gubernur terpilih.

Dengan langkah ini lengkaplah carut marut perpolitikan Papua. Proses pemilihan gubernur pertama Papua di dalam era Otsus dinodai dengan ketidakmampuan para politisi lokal untuk ikut dalam gaya demokrasi modern yang berpijak pada kepastian hukum, prosedur, dan mekanisme perolehan jumlah suara. Proses pemilihan langsung ini yang de facto tidak memenuhi harapan tiga pasangan yang kalah ternyata tidak dapat diterima secara dewasa sekalipun MA telah memberikan keputusannya. Inilah yang sebenarnya menunjukkan sejauh mana tingkat kemampuan politisi kita di Papua dalam memahami dan menghayati sistem pemilu langsung. Senyatanya kepentingan masyarakat luas tidak menduduki prioritas utama. Kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan tim sukses itulah yang menjadi kriteria utama. Kiranya rakyat akan menilai kinerja mereka di lapangan nantinya. Keputusan pengadilan tertinggi

ternyata dianggap tidak ada oleh politisi yang sebelumnya menjagokan diri sebagai calon pemimpin Papua. Apa jadinya jika mereka ini sungguh-sungguh memimpin Papua? Apakah hukum akan ditegakkan dan dihormati? Apakah hak-hak asasi rakyat Papua dilindungi? Lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang dihayati oleh para politisi tentang politik: apakah politik adalah alat kekuasaan semata atautkah sarana untuk menyejahterakan rakyat?

III. Mengadili Kebebasan Warga

Pada tgl. 6 April 2006, Polda menyerahkan berkas pertama 15 tersangka kasus Bentrokan 16 Maret di depan Uncen, Abepura, yang telah menewaskan 3 anggota brimob dan 1 anggota AURI. Penyerahan ini menandai proses pengadilan terhadap mereka yang dituduh bertanggung jawab atas insiden kekerasan tersebut.

Sementara itu, Polisi terus memburu Daftar DPO yang berisikan 19 nama. Yang menarik dari perburuan DPO adalah bahwa orang yang dicari seperti Jefri Pagawak sebenarnya diketahui lokasi keberadaanya: di Timika. Pihaknya mengaku tidak berada di lokasi saat terjadi bentrokan dan tidak terlibat. Pernyataan ini disampaikan kepada media massa dan tidak ada langkah hukum dari Polisi untuk memanggil yang bersangkutan di Timika atau upaya hukum lain. Hal serupa terjadi dengan Markus Haluk yang kemudian mendatangi Polda dan memberikan klarifikasi sehingga dia 'dibebaskan' dari DPO tersebut begitu saja.

Proses persidangan kasus B 16 M menarik dan penting diikuti karena di sinilah diuji pemenuhan asas persamaan di muka hukum. Kasus ini berawal dari protes dan tuntutan penutupan PT Freeport Indonesia (PTFI). Akar masalah ini tidak boleh dilupakan dalam menganalisis proses persidangan dan seluruh insiden yang telah mendatangkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit itu. Yang menarik adalah bahwa sejak awal persidangan hingga akhir PTFI hampir tidak pernah disebut-sebut dan lenyap dari wacana yang ada padahal soal inilah yang menjadi pusat perhatian dan alasan adanya demo dan gerakan perlawanan mahasiswa Papua.

Jika kita ikuti dengan cermat, sejak awal persidangan sebagian besar terdakwa menolak BAP yang mereka tandatangani di kepolisian karena mereka mengaku melakukannya di bawah tekanan dan penyiksaan saat menandatangani hal ini. Hal ini dikuatkan oleh permohonan penasihat hukum agar para terdakwa dipindahkan dari tahanan Polda ke Abepura. Penolakan ini tidak hanya terjadi sekali tetapi berulang kali sehingga memberikan sinyal kuat bahwa proses pengadilan ini bermasalah.

Alih-alih mendapatkan perhatian agar proses persidangan dilakukan dengan adil dan jujur, para terdakwa ternyata justru mengalami tindak penyiksaan saat hendak menghadiri acara persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura di Abepura. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pelaku penyiksaan adalah anggota polisi yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum. Kawalan polisi ternyata tidak bersifat melindungi tetapi hendak memastikan bahwa proses penghukuman itu berjalan sesuai yang dikehendaki oleh penguasa.

Indikasi keganjilan persidangan makin nyata dengan tindakan Jaksa dan majelis Hakim yang menolak semua eksepsi meski sebagian terdakwa jelas-jelas menunjukkan bekas luka yang diderita atau bahkan sakit yang masih diderita. Fakta ini mau mengatakan apa sebenarnya? Apakah pengadilan ini sudah 'dipesan' sejak awal oleh pemegang

kekuasaan di negara ini seperti saat rombongan pejabat tinggi yang membidangi pertahanan dan keamanan berkunjung ke Jayapura tgl. 17 Maret 2006 lalu? Mengapa hakim tidak bersifat netral dalam melihat fakta-fakta persidangan? Mengapa aparat polisi justru menyiksa terdakwa persis di muka hidung majelis hakim tanpa ada sanksi sedikitpun?

Pertanyaan berikut adalah mengapa media hanya terfokus pada proses persidangan tanpa bertanya mengapa mereka disidangkan? Alasan apa mereka demo dan terhadap siapa mereka demo? Pertanyaan kritis semacam ini hampir tidak dijawab oleh media lokal. Menurut pengamatan SKP, hanya Suara Perempuan Papua yang coba menggali latarbelakang masalah ini secara lebih luas hingga ke persoalan konflik masyarakat vs PTFI. Kaitan masalah yang ada antara kasus B 16 M dengan PTFI diputus dan hilang lenyap dalam seluruh pemberitaan dan persidangan. Apakah ini mengindikasikan sentimen publik yang sudah memvonis mahasiswa itu sebagai pelaku kejahatan politik sebelum persidangan mulai? Kalau kita menengok kembali bagaimana media TV nasional mengulang-ulang tayangan pembunuhan terhadap 3 polisi di depan Uncen, kiranya sulit dihindari kesimpulan adanya upaya untuk membentuk opini publik ke arah tertentu. Pencitraan memiliki dampak yang ampuh dalam membentuk opini dan TV dalam hal ini berperan amat kunci. Siapapun pelakunya, ternyata pihak ini telah berhasil membentuk citra media bahwa kerusuhan ini adalah kerusuhan politik yang menandatangani korban di pihak polisi. Karena itu wajar saja jika polisi membalas dendam. Inilah pesan yang tersalur di situ.

Segi lain yang perlu kita lihat adalah bagaimana lembaga-lembaga tinggi negara menyikapi problem ini. Tak satupun dari anggota DPR Papua, MRP, atau pejabat pemerintah hadir dalam persidangan ini atau mengunjungi para tahanan di penjara padahal jelas-jelas demo itu tentang PTFI. Mereka justru sibuk untuk bersiap-siap ke Amerika Serikat guna menangani kasus ini sehingga mendapat kritik tajam dari anggota Komisi A DPRP sendiri (26 Mei).

Kritik juga datang dari WALHI yang menerbitkan analisis tentang dampak operasi PTFI terhadap eksistensi manusia di Timika. Laporan ini secara canggih mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk panel independen yang mengkaji semua hal yang berkaitan dengan skenario penutupan tambang emas dan tembaga raksasa ini. Hal serupa juga dibuat oleh kelompok yang menamakan diri 'Solidaritas tutup Freeport' yang berusaha mencari solusi bagi proses perusakan alam dan manusia yang amat serius yang sedang terjadi di Timika dan sekitarnya akibat kehadiran PTFI yang tak terkontrol oleh siapapun. Namun sayang, kedua inisiatif ini tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan bahkan usaha untuk mengadakan seminar kecil dilarang.

Dengan mencermati alur ini, maka sulit dihindari kesimpulan bahwa yang diadili sebenarnya adalah kebebasan berekspresi rakyat Papua dalam menentang pengurusan kekayaan alam Amungsa oleh PTFI. Yang dihakimi adalah kebebasan warga untuk melawan pihak yang merendahkan martabat rakyat Papua.

IV. Keamanan atau Pengawasan

Situasi keamanan yang cukup tegang pasca bentrokan berdarah di Abepura makin dipertegang oleh penyerangan kelompok TPN/OPM terhadap pos tentara Yonif 509 di Kampung Wembi, Distrik Arso-Keerom. Serangan kilat ini menewaskan 2 orang tentara dan 2 orang penyerang, 1 orang luka-luka, dan 1 orang dalam keadaan kritis. Peristiwa

ini amat mengejutkan karena terjadi saat Poltekes sedang mengadakan pengobatan massal di Puskesmas Wembi yang berjarak sekitar 100 meter dari Pos TNI tersebut.

Tak pelak lagi peristiwa semacam ini mendatangkan reaksi balik dari TNI yang segera mengadakan operasi penyisiran seperti diperintahkan oleh Pangdam XVII/ Trikora, Mayjen. TNI George Toisutta. Dampak dari operasi semacam ini amat jelas: warga kampung mengalami ketakutan, kekurangan makan karena tidak boleh pergi ke kebun mereka yang jauh dari kampung, dicurigai, dan diawasi. Dalam berbagai pertemuan yang dihadiri oleh SKP sendiri, pihak TNI terus menekankan bahwa masyarakat pasti tahu mengenai rencana ini karena ada hubungan saudara; sedangkan masyarakat dengan jujur mengatakan bahwa mereka tidak tahu-menahu. Ciri-ciri fisik kelompok penyerang bukan berasal dari Wembi dan sekitarnya. Namun demikian keterangan ini tidak banyak didengar apalagi dipercaya. Operasi penyisiran jalan terus dan sebagai akibat sejumlah orang ditangkap oleh pihak TNI, diinterogasi secara maraton meski tidak dilukai, dan sebagian dilepas setelah ada tekanan dari pihak Gereja Katolik setempat. Suasana ini amat mengganggu umat yang tengah merayakan Hari Paskah karena ketakutan dan menipisnya cadangan makanan menjadikan warga masyarakat merasa lumpuh sehingga tidak bisa merayakan Paskah sewajarnya.

Di kota Jayapura, tidak lama sesudah kejadian di Abepura, tiba-tiba Bendera Bintang Kejora berkibar di gedung rektorat Uncen. Tidak ada pihak yang menyatakan diri bertanggung jawab dengan hal ini dan polisi segera mengamankan. Insiden ini makin menguatkan suasana curiga di Jayapura mengingat trauma peristiwa 16 Maret belum hilang dan tiba-tiba kita semua dikejutkan oleh peristiwa ini. Muncul berbagai pertanyaan: siapa yang buat ulah ini? Apakah ini rekayasa lagi dan dengan maksud apa? Mengapa 'naik bendera' terjadi di lokasi pendidikan tinggi yang menjadi tempat pengumpulan orang muda Papua yang secara kritis menilai perkembangan sosial-politik di Papua dan menyuarakan suara rakyat? Berbagai pertanyaan ini tinggal sebagai pertanyaan karena polisipun tak mampu mengungkapkan pelakunya hingga detik ini.

Lain Jayapura, lain Sydney-Australia. Pengibaran bendera di sana terjadi secara terbuka tanpa bahaya digerebek polisi apalagi tentara. Pesan dan aspirasi M secara lantang disuarakan oleh kelompok pendukung kemerdekaan Papua di Australia. Kegiatan semacam inilah yang menjadikan pemerintah secara gampang mempersalahkan 'pihak asing' sebagai penyebab ketidakstabilan politik di Papua seperti diungkapkan oleh menteri pertahanan (28 Juni) apalagi tikaman Australia dengan pemberian suaka belum pulih benar.

Selain mempersalahkan pihak asing, tuduhan kepada Gereja-gereja juga menjadi tuduhan klasik untuk mengelak dari tanggung jawab. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. C. Berotabui, perlu angkat bicara dan menjelaskan posisi gereja-gereja dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian didasarkan pada panggilan kenabian mereka.

Dari catatan SKP selama triwulan ini gaya 'beladiri' masih amat mendominasi wacana pertahanan dan keamanan Pemerintah mengenai Papua. Selama sudut pandang ini dominan, kiranya sudut pandang dialog tetap kurang mendapat tempat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah bersedia membuka diri ke arah dialog selama kebijakan pertahanan dan keamanan bersifat mengontrol? Jika Aceh dapat diselesaikan di meja perundingan, kapan Papua mendapat giliran? Apakah menunggu korban lebih banyak?

V. Sandiwara Politik: obral janji kemakmuran

Media dan ingatan publik terus mencatat bagaimana wabah korupsi belum juga ditangani secara efektif meski hal ini menjadi bagian dari janji SBY-Kalla saat kampanye dan 100 hari masa pemerintahan pasangan ini. Dalam konteks kita di Papua, kita bersama-sama mencatat bahwa pejabat-pejabat daerah makin dililit perkara korupsi. Perkara mantan Bupati Jayawijaya, David Hubi, menyedot perhatian besar dari para pendukung, musuh politik, dan aparat penegak hukum.

Selain itu, yang lebih menyedihkan adalah kinerja pemda-pemda yang nota bene dipilih oleh rakyat secara langsung terus, hanya omong besar soal Dana Otsus, Pelayanan Kesehatan, khususnya terhadap Ibu dan Anak, dan bidang Pendidikan. Berbagai kasus korupsi, kemacetan pelayanan publik telah menjadi litani keluhan masyarakat yang tak kunjung putus.

Otsus yang telah direduksi menjadi sekedar soal uang sekarang direduksi lagi hingga menjadi soal janji. Sulit dipastikan kapan janji itu akan dipenuhi karena fakta-fakta mencatat soal DPRP yang berwacana atau Pemda yang mengobral janji juga. Belum satu perdasuspun dibentuk hingga triwulan kedua ini dan mau sampai kapan ketidakjelasan ini berbuntut pada korupsi?

Bidang kesehatan yang menjadi andalan kampanye semua kandidat bupati dan gubernur ternyata justru mencatat adanya wabah muntaber yang berat digolongkan sebagai KLB di Wamena karena memakan korban ratusan orang. Ternyata situasi semacam ini tidak hanya terjadi di pegunungan tetapi juga di Biak yang tergolong lebih maju infrastruktur, fasilitas, dan layanan kesehatannya, 7 orang meninggal akibat diare (18 April).

Kelompok yang paling rentan adalah kelompok ibu-ibu dan anak-anak. Laporan dari Kabupaten Asmat, misalnya, menggambarkan bahwa kelompok ini ternyata mengalami problem gizi buruk dan angka kematian ibu dan anak yang tergolong tinggi. Dari 2.346 anak dan balita yang berhasil didata, 129 balita mengalami gizi buruk. Ini berarti sekitar 6% balita yang ada mengalami gizi buruk. Persoalan menjadi lebih rumit dengan tingginya angka kematian bayi menurut Dinkes Provinsi Papua (29 Mei). Contoh lain adalah ketersediaan vaksin yang tidak menjangkau jumlah ibu dan anak seperti terjadi di Sentani, tidak jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Papua (12 April). Pekan Imunisasi Nasional yang disambut baik oleh kalangan ibu-ibu ternyata tidak menyiapkan sarana yang memadai sehingga dikuatirkan cakupan imunisasi juga rendah. Jika ini terjadi maka tinggal dihitung hari saja kapan akan terjadi KLB penyakit tertentu.

Cerita menjadi lebih gelap saat bicara mengenai pertambahan angka penyakit HIV dan AIDS. Sejumlah LSM yang bergiat menangani masalah ini melaporkan secara teratur kenaikan angka penderita HIV/AIDS yang ada di Papua dan makin mencapai tingkat mengkuatirkan karena telah menyerang ibu rumah tangga dan bayi dengan prosentase terbesar ada di kalangan orang Papua. Kenyataan baru ini patut diseriisi jika kita bicara mengenai hak hidup orang Papua.

Segi lain yang patut kita soroti adalah rendahnya anggaran kesehatan dibandingkan sektor lain dalam APBD. ICS misalnya menyoroti bahwa senyatanya Pemprov Papua pada RAPBD 2006 hanya menganggarkan Rp. 196,29 miliar dari total anggaran Rp. 4.015,57 triliun. Ini berarti hanya sekitar 4,8 persen padahal menurut UU Otsus pasal.... Dan standar WHO dana yang harus dialokasikan sebesar Rp. 196,29 milyar atau

sebesar (15%). Faktor inilah yang menjadi indikasi nyata bahwa pemerintah dan para politisi sekedar obral janji kepada rakyatnya mengenai tingkat kemakmuran.

Sayangnya, kebijakan belum banyak berubah sementara kenyataan di lapangan penyakit-penyakit telah berkembang amat cepat dan ganas. Anehnya, halangan geografis, perilaku masyarakat yang kurang higienis justru bukan menjadi alasan untuk lebih giat dan serius menangani masalah kesehatan tetapi justru menjadi dalih untuk mengelak dari tanggung jawab. Betapa sering kita mendengar ungkapan pejabat seperti 'masyarakat kita memang memiliki budaya demikian' atau 'lokasi pemukiman tersebar dan sulit dijangkau sehingga kami tidak ke sana'.

Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, rendahnya anggaran pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat yang tidak sehat, isolasi geografis, dan tingginya penyakit yang mematikan merupakan kombinasi fatal yang amat pelik dan terus menerus mengancam kelangsungan hidup orang Papua.

Situasi serupa terjadi di bidang pendidikan. Unsur-unsur yang dapat kita analisis adalah mulai dari fasilitas belajar mengajar, angka anak bersekolah, anggaran dana, dukungan dari masyarakat sendiri. Dalam potret peristiwa triwulan ini muncul satu fakta yang mencengangkan. Tak jauh dari Kota Jayapura, di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, anak-anak tidak memiliki gedung sekolah dan guru (4 Mei). Akibatnya mereka harus bersekolah di gereja setempat dan dengan guru anggota TNI yang bertugas di situ. Kisah serupa juga dialami di Mimika (16 Mei), Distrik Ninia-Yahukimo (16 Mei), Asmat (23 Mei), Biak Numfor (26 Mei), Distrik Skamto-Keerom (27 Juni).

Unsur lain yang lebih tipikal Papua adalah pemalangan lokasi sekolah oleh pemilik hak ulayat. Peristiwa ini terjadi di mana pun di Tanah Papua dan kadangkala tidak terlalu mudah diatasi. Pemalangan yang terjadi di SMP Negeri IV Manswan Biak, misalnya, terjadi karena Marga Simopiaref menolak pemberhentian Kepala Sekolah dari marga tersebut dan menuntut agar pengganti kepala sekolah berasal dari marga ini. Meski kurang terlalu rinci informasi yang terbaca di media lokal, yang jelas adalah pelaksanaan ulangan semester dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut terhalang bahkan terhenti samasekali. Kerugian komunal inilah yang seringkali tidak diperhitungkan oleh warga masyarakat sendiri karena kepentingan kelompok lebih diunggulkan.

Segi lain yang penting untuk dicermati adalah dampak dari kekacauan sistem UAN terhadap proses belajar siswa di Papua. Sistem ini telah menuai kritik di tingkat nasional dan terus dipaksakan jalan oleh Wapres Yusuf Kalla dan Mendiknas, Bambang Soedibyo. Salah satu contoh kecil adalah ketidaklulusan siswa yang kemudian berdemo ke Komisi E DPR Papua. Kelompok ibu-ibu orang tua murid mengungkapkan ketidakmengertiannya atas sistem ini dan sekaligus rasa ketidakberdayaannya karena sistem ini berlaku secara nasional tanpa pandang keragaman dan konteks sosial setempat.

VI. Orang Kecil Tetap Tersingkir

Catatan peristiwa dalam seri no. 6 ini ditutup dengan salah potret kecil yang tersingkir dari pandangan kita: mama-mama penjual sayur di Kota Jayapura. Mereka ini dari masa Pasar Ampera hingga Pasar Youtefa tetaplah menjadi penonton di pinggir pentas ekonomi. Problem pasar tradisional justru bertambah sesaat mereka dipindahkan ke pasar Youtefa mulai dari pungli, pencurian, banjir, akses transportasi yang sulit dan

mahal, sampai dengan perbedaan mencolok antara pedagang pendatang dan pedagang asli Papua.

Selain itu kebijakan yang tumpang tindih makin memperkeruh keadaan karena di satu sisi, Pemkot Jayapura menegaskan secara mati-matian pasar tunggal, tetapi di lain sisi, pihak yang sama membangun kembali pasar penyangga. Ketidakpastian kebijakan ini tentu saja menyiratkan kekurangan di bidang perencanaan dan tata kota Pemkot Jayapura.

Demikianlah catatan mengenai borok-borok sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang dipotret oleh SKP Jayapura dalam triwulan ini.